

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS KOPERASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN PENGURUS KOPERASI UNIT DESA DI
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MISBAHUL MUNIR

NPM : 137110119

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2019

MOTTO

“ Sesungguhnya manusia itu memiliki zona waktunya masing-masing, karena zona waktu kita pasti akan berbeda dengan orang lain, tapi percaya bahwa zona waktu kita adalah yang terbaik bagi kita. Jangan berputus asa atau pun iri dengan zona waktu orang lain. Sesungguhnya Allah maha tau mana yang terbaik bagi hamba-hambanya”



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, rasa syukur saya tiada henti saya ucapkan kepada Allah SWT sang maha rrahman dan rrahim. Karya ilmiah yang telah saya tulis dalam bentuk Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang mungkin pada saat ini pun mereka sebenarnya tidak bisa melihat dan membacanya, tetapi demi rasa tanggung jawab saya kepada beliau saya tetap menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Sesungguhnya saya benar tak bisa menggantikan rasa kasih sayang mu dengan apapun, kini saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT supaya engkau bisa di tempatkan di Jannahnya.Amin

Kepada keluarga dan calon makmum saya, saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih karena telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya saat ini dengan rasa semangat yang tinggi. Saya persembahkan juga karya ilmiah saya untuk pembimbing saya, Karena berkat beliau lah saya bisa mengerti arti penting kuliah dan banyak mendapat pengalaman pada saat ini, Karena beliau juga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

Sekali lagi saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada seluruh teman yang sudah ikut terlibat dalam membantu penyusunan karya ilmiah ini.Semoga Allah SWT membalas semua niat tulus belia-beliau karena telah membantu perjuangan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Amin . . .

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan banyak-banyak syukur karena telah selesainya penulisan Usulan Penelitian ini, Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dimana beliau sudah menunjukkan dan memberi penerangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. Penulisan Usulan penelitian ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Strata satu Jurusan Ilmu Administrasi Program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab demi bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kamakluman serta masukan masukan.

Penulis menyadari pula bahwa dengan proses studi maupun dalam proses penulisan usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

- menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Islam Riau.
 3. Bapak Henry Andry, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 4. Bpk. Dr. H. Tarmizi Yussa, MA. Selaku Pembimbing I (satu) saya, karna beliau lah yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan serta ilmu nya kepada penulis dan beliau juga telah membantu secara moril dan materil untuk menyiapkan tulisan ini dengan sebaik mungkin.
 5. Bpk. Indra syafri, S.Sos., M.si. selaku Pembimbing II (dua), juga telah memberikan bantuan baik berupa saran maupun pendapat supaya apa yang saya lakukan berjalan semestinya.
 6. Secara khusus penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada alm. Ayahanda dan almh. Ibunda tercinta serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan pengorbanan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menulis usulan penelitian ini dengan semangat yang ada.
 7. Terimakasih juga kepada para Dosen yang telah memberikan masukan dan arahan serta ilmu-ilmu yang sudah di sampaikan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawabnya.

8. Terimakasih juga buat para sahabat yang sudah memberikan bantuannya baik berupa semangat maupun tenaganya, dan terimakasih juga yang tak terhingga buat sahabat-sahabat yang sudah memberikan dorongan berupa semangat dan Doa guna untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
9. Dan terahir terimakasih banyak kepada masyarakat dan tetangga yang sudah memberikan dorongan berupa semangat dan doa-doanya.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau-beliau ini dibalas dengan rahamat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberi manfaat yang cukup berarti kepada setia pembaca

Pekanbaru, 10 November 2019

Penulis,

Misbahul Munir

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIRAN.....	22
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Adminitrasi dan Administrasi Publik.....	22
2. Konsep Organisasi dan Organiasasi Publik.....	25
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik.....	27
4. Konsep Peranan.....	30
5. Konsep Pemberdayaan.....	32
6. Pelatihan Pemberdayaan.....	36
7. Konsep Koperas dan KUD.....	40
B. Kerangka Pikir.....	45
C. Hipotesis.....	47
D. Konsep Operasional Variabel.....	47
E. Operasional Variabel.....	49
F. Teknik Pengukuran.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel.....	55
1. Populas.....	55
2. Sampel.....	55

D. Teknik Penarikan Sampel.....	58
E. Jenis dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Teknik Analisis Data	62
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	63
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.	64
A. Gambaran Umum Geografis Kabupaten Kuantan Singingi.....	64
B. Gambaran Umum Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.	68
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan Kantor Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.	69
1. Kepala Dinas.	70
2. Sekretaris.....	70
3. Kepala Bidang Koperasi dan UKM.	74
4. Kepala Bidang Industri.	79
5. Kepala Bidang Perdagangan.	84
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	87
A. Identitas Responden.	87
1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin.	88
2. Identitas Berdasarkan Latar Belakang Usia.	88
3. Tingkat Pendidikan.	89
B. Tanggapan Responden Tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	91
A. Mengumpulkan Informasi Untuk Menentukan Dibutuhkan Atau Tidaknya Program Pelatihan.	96
B. Pengembangan Program.	101
C. Evaluasi.	107
C. Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	112
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	117
BAB VI PENUTUP.	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.	122
DAFTAR LAMPIRAN.	126

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Perkembangan Jumlah KUD Pada Saat Ini di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018/2019.	10
II.1 : Operasional Variabel Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.	49
III.1 : Responden yang menjadi sumber informasi penelitian pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan	56
III.2 : Nama-Nama Koperasi di Kecamatan Singingi.	56
III.3 : Populasi dan Sampel Penelitian Pada Pengurus di Setiap KUD Kecamatan Singingi	57
III.4 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.	63
IV.1 : Batas Wilayah.	66
IV.2 : Daftar Nama-Nama Bupati Kuantan Singingi.	67
V.1 : Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin.	88
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia.	89
V.3 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	90
V.4 : Mengumpulkan Informasi.	97
V.5 : Pengembangan Program.	103
V.6 : Evaluasi.	108
V.7 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Terkait Dengan Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.	46
IV.1 : Lambang Kabupaten Kuantan Singingi.	64
IV.2 : Kantor Bupati Kuantan Singingi.	65
IV.3 : Peta Lokasi Kabupaten Kuantan Singingi.	65
IV.4 : Skema Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian Tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.	127
Lampiran 2 : Daftar Wawancara.....	131
Lampiran 3 : Rekap Telly Tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. ...	139
Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	142

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbahul Munir
NPM : 137110119
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Skripsi : Peranan Dinas Koperasi Industri dan perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang di daftarkan konferesnsi beserta seluruh isi dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar karya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademi dan keungan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10November 2019
Pelaku Pernyataan,

Misbahul Munir

**PERANAN DINAS KOPERASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM
MELAKUKAN PEMBERDAYAAN PENGURUS KOPERASI UNIT DESA
DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh

MisbahulMunir

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan dalam melakukan pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) yaitu pengurus Koperasi Unit Desa dengan cara memberikan bebara papelatihan dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pemberdayaan tersebut terhadap pengurus-pengurus Koperasi Unit Desa. Dengan sejalan penelitian ini maka populasi peneitian ini yaitu para pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabid. Kopersi pada Dinas Koperasi Industri dan UKM. Adapun teknik penarikan sampel yang peneliti gunakan yaitu Purposive Sampling dan Sensus. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data di kumpulkan dengan menggunakan cara Kuesioner dan Wawancara serta data Skunder dengan cara Observasi dan Dokumentasi. Sementara itu, teori yang peneliti gunakan yaitu Pelatihan sebagai salah satu fungsi pokok penelitian ini. Karena pemberdayaan ini sendiri melakukan kegiatan yaitu pelatihan, dengan pelatihan-pelatihan ini nantinya bisa membantu parapengurus Koperasi Unit Desa lebih terampil dan terdidik sehingga menghasilkan kemajuan untuk KUD. Dengan indikator yaitu Pengumpulan Informasi, Pengembangan Program, dan Evaluasi. Setelah penelitian ini di analisa menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif penelitian menunjukan Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Melakukan Pemberdayan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singing “CukupBerperan”.

KataKunci : Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, Peranan, Pelatihan, Pemberdayaan, Pengurus Koperasi Unit Desa

**THE ROLE OF INDUSTRIAL AND TRADE COOPERATION DEPARTMENT IN
EMPOWERING THE MANAGEMENT OF THE VILLAGE UNIT
COOPERATION IN SINGINGI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT**

ABSTRACT

By
MISBAHUL MUNIR

This research was conducted in Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to find out how the role of the Industrial and Trade Cooperative Office in empowering human resources (HR) is the Village Unit Cooperative management by providing some training and also to find out what are the barriers of the Office of Cooperatives and SMEs in empowering the management of the Village Unit Cooperatives.. In line with this research, the research population is the management of the Village Unit Cooperatives in Singingi District, Kuantan Singingi Regency and Kabid. Kopersi at the Office of Industrial and SME Cooperatives. The sampling technique that researchers use is Purposive Sampling and Census. Types and data collection techniques consist of data collected using questionnaires and interviews and secondary data through observation and documentation. Meanwhile, the theory that the researchers used is Training as one of the main functions of this study. Because this empowerment itself carries out an activity that is training, with these trainings it will later be able to help the Village Unit Cooperative managers be more skilled and educated so as to produce progress for the KUD. With indicators namely Information Collection, Program Development, and Evaluation. After this research has been analyzed using quantitative and qualitative methods the research shows the Role of the Department of Industrial and Trade Cooperatives in Empowering Village Unit Cooperative Management in Singingi District, Kuantan Singing Regency, "Enough to Play".

Keyword : The Industrial and Trade Cooperative Office, Role, Training, Empowering, The Village Unit Cooperative

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara structural keberadaan Pemerintah daerah dalam sistem administrasi public Indonesia berdasarkan landasan yuridis telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) disebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang”. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota pada dasarnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara umum tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah berdasarkan prinsip keadilan dan kesamarataan sosial yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 33 UUD 1945 BAB XIV mengenai kesejahteraan sosial, menyebutkan : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. dan (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara.

Kemudian untuk menindak lanjuti dari pasal 33 diatas maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian. Dimana isi dari Undang-Undang tersebut sesuai dengan Bab II pasal 4 yaitu “Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan sekaligus sebagai tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.Sebelunyapada pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Olehkarenanya untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa, maka Negara Indonesia sendiri membentuk institusi ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan spirit bangsa Indonesia dimana fungsinya mengurus tentang tatanan perekonomian yaitu “koperasi”.Koperasi dibentuk bukan hanya untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia tetapi juga untuk memberi pelatihan kepada semua lapisan masyarakatIndonesia agar dapat mandiri dalam menjalankan suatu urusan tentang perekonomian dengan dasar semangat kekeluargaan untuk mengembang masyarakat.

Koperasi ini sendiri diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wirat Atmaja di purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan renternir. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai hari koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Namun pada saat ini ada beberapa masalah atau kendala yang sedang dihadapi oleh Koperasi Indonesia masalah-masalah tersebut timbul dari persoalan bidang struktural maupun dalam bidang pengembangan usaha. Kemudian Moh. Hatta sebagai bapak Koperasi mengusulkan didirikannya 3 macam Koperasi yaitu : (1) Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. (2) Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). dan (3) Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal

Dalam bidang struktural koperasi masalah tersebut dapat kita kelompokkan sebagai berikut :

1. Kelembagaan Koperasi yang belum mampu menggiring perkembangan usaha diakibatkan kurangnya kekuatan struktural dan pendekatan pengembangan kelembagaan yang kurang memadai, selain itu bisa dibilang bahwa koperasi Indonesia belum terlalu fleksibel dalam hal peluasan dan perkembangan usaha.
2. Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dalam hal ini struktur organisasi umumnya kurang terampil dalam menghadapi masalah yang muncul pada koperasi dan dalam hal kreatifitas perkembangan usaha tersebut.
3. Selain itu pun, masalah yang timbul dari merosotnya koperasi ini karena telah munculnya Badan Usaha Milik Desa yang mana membuat Koperasi Unit Desa yang ada kurang di abaikan.
4. Serta banyaknya para agen-agen kelapa sawit yang mampu membeli hasil perkebunan para petani.

Sedangkan dalam bidang perkembangan usaha masalah yang masih dapat kita lihat dan temui antara lain :

1. Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan diberbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.
2. Masih minimnya sumber daya manusia yang cakap dalam mengembangkan koperasi yang ada seperti Koperasi Unit Desa yang akhir-akhir ini tidak berkembang semestinya sebagai potensi yang dapat memfasilitasi perekonomian masyarakat di perdesaan.

Sebagaimana dikatakan (Yusa :,) KUD dalam era reformasi kurang diperhatikan dan cenderung stagnan. Padahal pada masa orde baru organisasi ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai lokomotif ekonomi desa, membantu swasembada beras. Akhir-akhir ini terkesan KUD tidak lagi menunjukkan eksistensinya dan kebanyakan “mati suri”. Padahal institusi ekonomi desa yang menyebar diseluruh tanah air tersebut merupakan potensi besar, dan dapat dijadikan sebagai potensi ekonomi andalan dalam menghadap percaturan MEA.(

Sumber

Beberapa KUDdi Riau, didapati bahwa kebanyakan KUD tidakaktif disebabkan oleh berbagai faktor penting, sehingga diperkirakan apabila tidak dpulihkan akan stagnan dalamwaktu yang relatif lama. Itulah beberapa potret yang ada pada saat ini dimana bila dibandingkan dengan masa Orde baru. Koperasi pada saat itu lebih berkembang cukup baik. Karena pada masa pemerintahan saat ini, seharusnya Kepala Desa pun ikut berperan aktif dalam meningkatkan Koperasi Unit Desa sebagai sarana peningkatan ekonomi dengan asas kekeluarga spirit masyarakat desa.

Karena pentingnya Upaya pengelolaan koperasi dalam membantu perekonomian rakyat maka melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah, Pemerintah telah menyerahkan pada setiap daerah kabupaten/kota melalui urusan wajib tentang pengembangan.

Salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengembangkan koperasi disini adalah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari rincian setruktur Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor. 15 Tahun 2010, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri No. 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan Koperasi, Maka pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan VisiDinsas Koperas dam Usaha Kecil Menengah sebagai berikut: “Terwujudnya Koperasi, Industri dan Perdagangan yang maju, tangguh dan mandiri serta berperan sebagai penggerak perekonomian kerakyatan“. Kemudian diikuti pula dengan Misi sebagaiberikut :Memberdayakan dan Mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahmenjadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan “.

Dalam kondisi ekonomi kini kabupaten Kuantan singingi ini sendiri khususnya di Kecamatan Singingi sangat membutuhkan Koperasai, karena tujuan awalnya adalah untukmemfasilitasi dan memberikan perlindungan kepada petani kelapa sawit dari sistem ijon sebagai agen tidak resmi mata rantai pemasaran kelapa sawit yang cendrung mencari keuntungan lebih sehingga menghambat kesejahteraan para petani kelapa sawit. Untuk itu agar para petani kelapa sawit bisa mendapatkan pengayoman dari adanya koperasi,

dimananantinya bisa meringankan dan mempermudah para petani kelapa sawit untuk untuk mengembangkan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai anggota Koperasi Unit Desa. Diantara usaha yang dapat dijalankan dan keuntungan yang akan diperoleh oleh para anggota diantaranya sebagai berikut :

1. Koperasi akan memfasilitasi jalannya jual beli kelapa sawit.
2. Koperasi akan menyediakan kebutuhan para petani yang berkaitan dengan perkebunan nya.
3. Koperasi pun menyediakan sembako untuk petani yang mana sistem pembayarannya dapat di cicil setiap petani mendapatkan gaji dari hasil perkebunannya, yang biasa para petani namakannya sebagi WASERDA (Warung Serba Ada).

Dari adanya hal-hal yang telah disampaikan diatas itu lah yang nantinya untuk meningkatkan spirit atau meningkatkan semangat para petani untuk bisa menjual buahnya kepada koperasi, karena apabila tidak seperti itu maka koperasi itu sendiri akan kalah saing dengan agen-agen kelapa sawit yang ada.

Oleh karena itu maka Dinas Koperasi dan Industri memiliki visi dan misi, untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan menyusun setruktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris
3. Kepala Bidang Koperasi dan UKM
4. Kepala Bidang Industri
5. Kepala bidang perdagangan

6. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

7. Kelompok jabatan fungsional

Sebagai organisasi pemerintahan yang akan mendorong dan menggerakkan perekonomian rakyat, maka Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan :

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui pembangunan Koperasi, Industri dan Pedagangan.
2. Meningkatkan kontribusi Koperasi Industri dan Perdagangan di Kuantan Singingi.
3. Meningkatkan kontribusi Koperasi Industri dan Perdagangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Meningkatkan peran Koperasi Industri dan Perdagangan untuk mendukung struktur perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi.

Sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2010 Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan usaha kecil menengah, Industri dan Perdagangan.

Pada pasal 47 dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah dimana yang dimaksud diatas yaitu, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan bidang teknis dibidang Koperasi, Industri dan perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, Industri dan perdagangan.
- c. Pemberdayaan unit pelaksanaan teknis dibidang Koperasi, Industri dan perdagangan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya fungsi dan peranan Koperasi diuraikan dalam Undang-Undang Bab II Pasal 4 No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai berikut :

“ Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan ”.

Sedangkan perkoperasian itu sendiri telah banyak dikembangkan diberbagai daerah dan kota di Indonesia, sampai ketinggian pedesaan. Dengan demikian pula di Kabupaten Kuantan Singingi Pemerintah mewujudkan melalui Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan berupaya untuk semaksimal mungkin mengupayakan pemberdayaan dan pengembangan perkoperasian rakyat sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Daerah. Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah, untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 47 yaitu berwenang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan yaitu pemberdayaan dan pengawasan KSP (kegiatan simpan pinjam) dan USP (usaha simpan pinjam) ditingkat Kabupaten, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi yaitu penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah, bimbingan penyuluhan Koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP serta pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Begitu pentingnya koperasi yang dapat mendorong perekonomian masyarakat, maka dari itu Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah otonom

telah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) diberbagai Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk menunjang kemajuan dari koperasi itu sendiri perlu adanya suatu perubahan yang mana di awalai dari SDM nya dan kemudian sistem administrasinya itu sendiri. Dimulai dari adanya transparansi dalam pendataan baik dalam segala bidang dan hal, kemudian akuntabilitas dimana akuntabilitas ini sendiri sebuah konsep yang dekat dengan administrasi, selain itu harus adanya nilai kejujuran dan diterapkan sistem pemberdayaan untuk dapat menunjang kemajuan suatu koperasi yang benar dan diharapkan oleh undang-undang dan anggota dari koperasi itu sendiri.

Kecamatan Singingi adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana memiliki beberapa Koperasi Unit Desa yang sedang berkembang yang sudah tersebar. Pada saat ini untuk Kecamatan Singingi sendiri memiliki 13 Desa, akan tetapi dari 13 Desa ini tidak semua memiliki Koperasi Unit Desa. Hanya ada 8 koperasi yang ada dari 13 desa tersebut, diantaranya : koperasi sumber jaya, koperasi makarti, koperasi makmur, koperasi Tirta Kencana, koperasi sejahtera, koperasi bina karya, koperasi Karya Agung,dan koperasi mekar jaya. Namun dari 8 koperasi yang telah berdiri ada beberapa Koperasi Unit Desa yang kegiatannya kurang berjalan lancar hingga saat ini. Untuk lebih jelasnya daapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I.1 Perkembangan Jumlah KUD di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018/2019.

No	Kecamatan	Alamat	Keterangan			Badan Hukum
	Singingi	Kelurahan/Desa	Aktif	Kurang Aktif	Tidak Aktif	
	Nama KUD					
1	KUD Sari Jaya	Pasir Emas		✓		1864/BH/XIII
2	KUD Makarti	Sungai Keranji	✓			1887/BH/XIII
3	KUD Makmur	Sungai Sirih	✓			1667/BH/XIII
4	KUD Karya Agung	Sumber Datar	✓			02/BH/KWK4/ 5.1/1/96
5	KUD Harapan Tani	Sungai Bawang			✓	1701 a/BH/XIII
6	KUD Pratama Jaya	Sungai Kuning		✓		1629 a/BH/XIII
7	KUD Sawit Jaya	Petai Baru	✓			1821/BH/XIII
8	KUD Tirta Kencana	Air Emas			✓	1703 a/BH/XIII

Sumber : Data olahan lapangan

Dari tabel diatas maka bisa di klasifikasikan bahwa adanya Koperasi Aktif, Kurang Aktif, dan Tidak Aktif. Berikut penjelasnya :

a. Koperasi Aktif

Dikatakan aktif apabila Koperasi itu mampu menjalankan fungsi simpan pinjam, akutansi koperasi, dan manajemen koperasi dengan baik. Apabila itu semua sudah berjalan dengan baik maka kperasi akan dapat mengelola organisasinya dengan benar, selain itu juga bisa dikatakan aktif apabila kegiatan yang ada didalam kopersi itu berjalan dengan lancar, seperti contoh : adanya kegiatan simpan pinjam untuk para petani kelapa sawit, dan berdirinya waserda (warung serba ada) guna untuk memenuhi kebutuhan petani.

b. Koperasi Kurang aktif

Dikatakan kurang aktif apabila adanya beberapa kegiatan seperti simpan pinjam, akutansi koperasi, dan manajemen koperasi itu tidak dijalan kan dengan benar. Sehingga koperasi ini kegiatannya hanya menampung buah sawit parapetani tidak ada yang lain, seperti kegiatan simpan pinjam tidak ada, waserda (warung serba ada) pun tidak ada.sehingga bisa di katakan kurang berkembang.

c. Koperasi Tidak Aktif

Koperasi yang dikatakan tidak aktif disini adalah koperasi yang tidak sedang beroperasi. Jangan kan untuk menjalankan 3 kegiatan seperti yang di sampaikan diatas,bahkan untuk kegiatan menampung kelepa sawit pun

tidak ada, sehingga para petani menjual hasil kebun nya kepada para toke/agen kelapa sawit (tengkula).

Menurut tabel diatas jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kecamatan Singingi berjumlah 8 Koperasi Unit Desa dan di antaranya 4 Koperasi yang masih aktif, 2 Koperasi yang tidak aktif dan 2 koperasi yang kurang aktif..

Dari beberapa desa tersebutlah kita dapat mengetahui perkembangan yang telah berjalan terhadap beberapa koperasi yang ada. Dimana koperasi itu sendiri dapat maju atau berjalan sesuai dengan yang diinginkan, apabila Kepala Desa dapat ikut campur di dalam kegiatannya sebagai pemberi motivasi dan masukan, karena mau bagaimanapun kepala desa termasuk ikut andil dalam memajukan koperasi-koperasi yang ada disetiap desanya. Jika kepala Desa tidak bisa ikut andil maka apa yang dicita-citakan oleh Koperasi itu hanya berjalan seadanya dan tidak maksimal.

Adapun indikator penilaian untuk menyatakan bahawa koperasi itu aktif atau tidak telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang pemingkatan koperasi. Koperasi yang bisa dinyatakan aktif apabila bisa menjalankan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan rapat-rapat sesuai ketentuan
- 2) Manajemen pengawasan baik
- 3) Keberadaan dan tingkat realisasi RK (rencana kerja) dan RAPB (rencana anggaran pendapatan dan belanja)
- 4) Kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan baik
- 5) Kinerja kepengurusan

- 6) Tertib Administrasi
- 7) Keberadaan sistem informasi
- 8) Kemudahan untuk mengakses informasi

Kemudian ada yang perlu ditekankan dalam penelitian ini, bahwasanya hampir semua KUD yang berada di kecamatan Singingi ini berorientasi kepada sektor perkebunan, dimana KUD-KUD yang ada pada setiap Desa di Kecamatan Singingi ini menaungi para petani kelapa sawit untuk dapat menstabilkan harga pasar sehingga para petani tidak menjual hasil perkebunan kepada pihak lain yang mana harga beli lebih murah. Dalam hal ini perlu di fahami bahwasanya Koperasi Unit Desa sebagai jenis usaha ekonomi kerakyatan yang paling lama telah berdiri di tiap-tiap Desa khususnya di Kecamatan Singingi dan umumnya di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ini lah yang menjadi lokus dan fokus penelitian karena ada kecenderungan KUD mulai melemah dengan beratnya kompetisi dari usaha-usaha ekonomi kerakyatan lainnya.

Secara umum Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pemberdayaan, Selanjutnya penulis pun menguraikan bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah di realisasikan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan kepada pengurus-pengurus KUD, dan semua KUD diberi pembekalan dalam bentuk yang sama hanya saja dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda dan tidak terjadwal.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM telah di susun program kerja sebagai berikut :

1. Pelatihan kewirausahaan

2. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
3. Pelatihan simpan pinjam
4. Pelatihan akutansi koperasi
5. Pelatihan manajemen pinbuk inkunbasi bisnis usah
6. Promosi produk usaha mikro
7. Pelatihan manajemen koperasi
8. Pelatihan manajemen pemasaran bagi UKM
9. Fasilitas perkuatan permodalan dari kementrian dan dinas koperasi provinsi
10. Pembinaan berkaitan produksi hulu
11. Pelayanan perizinan industri
12. Akselerasi perencanaan dan pengembangan industri ferinitur dari kayu
13. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
14. Sosialisasi izin usaha industri terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah
15. Pelatihan kerajinaan bambu
16. Pelatihan pembuatan souvenir dari kayu
17. Pelatihan kerajinan border
18. Pelatihan pandai besi
19. Peluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
20. Pembuatan pelebelan SP kesehatan, sertifikasi halal dan bercode
21. Pelatihan AMT

22. Pelatihan CEFE
23. Sosialisasi GMT
24. Mengikuti gelar teknologi tepat guna
25. Pelatihan pembuatan batako
26. Penyebarluasan informasi pasar
27. Fasilitas penyelesaian sengketa daya
28. Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha
29. Pengembangan pasar dan industri barang/produk
30. Peningkatan sistem dan jaringan informasi industri
31. Penyebarluasan Informasi Pasar
32. Fasilitas Penyelesaian Sengketa Daya
33. Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha
34. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
35. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
36. Pengawasan mutu dayanya pedagang kaki lima dan asongan

Sumber : Buku Restra Diskoperindag

Namun dari banyak program yang telah tersusun seperti keterangan diatas, hanya beberapa yang telah direalisasikan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan pengurus KUD. Selanjutnya penulis pun menguraikan bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah di realisasikan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan kepada penguurus-pengurus KUD, dan semua KUD diberi pemberdayaan dalam bentuk pemberdayaanyang sama. Jenis-jenis pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan kepada pengurus KUD

adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan pada pengurus seperti :

- a. Pelatihan Simpan Pinjam KSP/USP
- b. Pelatihan Akutansi Koperasi
- c. Pelatihan Manajemen Koperasi

Kondisi KUD yang tidak aktif atau macet, sangat berkaitan dengan kemampuan pengurus dalam mengelola Koperasi. Untuk mengaktifkan dan mengembangkan KUD, maka perlu dilakukan pemberdayaan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan. Kondisi lemahnya koperasi merupakan fenomena umum di Indonesia. Menurut Hasanuddin bahwa : Koperasi yang didirikan secara genuine dengan basis anggota yang jelas juga bisa mengalami sakit. Manakala mengabaikan faktor pendidikan. Melalui Pendidikan dan pelatihan yang kontinue anggota dapat mewujudkan tatakelola koperasi yang baik atau *good cooperative governance* . Artinya pendidikan dan pelatihan merupakan kunci penting untuk pemberdayaan. manakala pemberdayaan itu adalah Menurut Kartasmita dalam (Power and Powerment. Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. 16;1996. Jakarta), mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini,

pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan dan kemampuan, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.,

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Berkaitan dengan kondisi KUD di kecamatan Sengingi pada umumnya ditemui fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Sesuai Perda Kuantan Singingi No.15 Tahun 2010, tentang fungsi dan tugas pada pasal 47 tentang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi meliputi, salah satunya adalah pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dengan ini Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun dalam pemberdayaan tersebut, tidak semua KUD bisa berkembang dengan baik sesuai dengan pemberdayaan yang diberikan oleh dinas tersebut. Contoh, Tidak semua pengurus koperasi dapat melakukan kegiatan akutansi dan manajemen dengan baik karna masih kurangnya ilmu tentang 2 aspek tersebut.
2. Masih rendahnya kemampuan pengurus-pengurus KUD yang ada di kecamatan ini dalam mengelola organisasi KUD. Dari 13 Desa hanya

terdapat 8 KUD yang masih ada dan kebanyakan macet dan tidak berkembang. ada akan tetapi eksistensi tidak nampak sama sekali

3. Dalam melakukan pemberdayaan Dinas Koperasi dan Perdagangan menggunakan metode pendidikan dan pelatihan. Namun ada kecenderungan yang diberikan oleh Dinas tersebut dapat diterapkan dengan baik oleh pengurus-pengurus KUD yang ada. contoh, pendidikan manajemen, akuntansi maupun pendidikan simpan pinjam. Namun metode ini belum teruji untuk pemberdayaan pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa. Karena ada kecenderungan kebanyakan KUD tidak berkembang atau mati suri.

Asumsinya kondisi demikian perlu dilakukan pemberdayaan terhadap KUD di kecamatan ini baik pemberdayaan structural untuk pengembangan maupun pemberdayaan fungsional untuk meningkat efektifitas dan produktivitas KUD demi tercapain kesejahteraan anggota KUD. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan terhadap Koperasi Unit Desa ini sangat membantu para pengurus yang ada di KUD itu sendiri. Selain dia lebih banyak mendapatkan ilmu maupun wawasan tentang apa yang didapatkan dari pemberdayaan itu, mereka pun akan lebih bisa cekatan dalam menjalankan tugas dan kewajibanya. Masyarakat juga akan merasakan hasilnya juga, karna apabila Koperasi Unit Desa berjalan sesuai dengan mestinya tentu yang sangat diuntungkan adalah para naggotanya itu sendiri yaitu para petani kelapa sawit. Dengan meningkatnya perekonomian melalui KUD diharapkan kehidupan

ekonomi para anggota akan lebih terjamin, dan membaik maka akan dapat memicu kemajuan sektor-sektor lainnya.

Banyaknya permasalahan dihadapi oleh KUD maka perlu dilakukan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan terhadap pengurus KUD di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi agar para pengurus KUD dapat mengembangkan KUD di kecamatan ini. Hal ini juga sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, melakukan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di wilayah kerjanya dengan berbagai cara diantaranya dengan melakukan transfer pengetahuan melalui pendidikan, latihan dan kursus-kursus untuk meningkatkan kemampuan “power” organisasi KUD dimana persoalan yang mendasar dialami oleh Organisasi KUD macet dan tidak bisa berkembang.

Oleh karena itu, dari fenomena yang ada maka penulis ingin melihat sejauh mana peranan Dinas Koperasi dan Industri dalam melakukan pemberdayaan terhadap KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis pun tertarik untuk meneliti hal tersebut, dan peneliti memutuskan untuk judul usulan penelitian ini adalah “**Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Meskipun keberadaan kopererasi Unit Desa sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi dan mengembangkan ekonomi masyarakat Desa. Kenyataan kebanyakan KUD tidak aktif kecamatan Sengingi.. Dalam konteks memfungsi

lembaga KUD maka peranan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan memberdayakan KUD menjadi topik permasalahan. Maka penelitian merumuskan masalah tentang “ **Bagaimana Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.** “.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pemberdayaan dan pelatihan yang telah terjadi dilapangan
2. Menganalisis Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan dalam pemberdayaan KUD di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pemberdayaan pada KUD di Kecamatan Singingi.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai masukan dan menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang perkoperasian dan suatu pemberdayaan yang baik yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan.
2. Diharapkan sebagai suatu pelajaran, sebagaimana dalam suatu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan ini, ternyata masih ada beberapa KUD yang masih

belum bisa maju karena kurang perdulinya atas pelatihan-pelatihan yang diberikan Dinas tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Karena tanpa adanya konsep teori yang dikemukakan oleh para ahli, maka sebuah penelitian ini hanyalah sebuah tulisan tanpa adanya panduan. Dalam penulisan ini peneliti mengawali dengan teori tentang Administrasi.

1. Konsep Administrasi atau Administrasi Publik

Menurut Ahmad Tarmizi, dalam Peranan Administrasi Publik dalam Memperkuat Kemampuan Organisasi Pemerintah, Administrasi publik telah mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Mulai dari abad ke -19 sampai abad ke -21 tetap menunjukkan eksistensinya. Kontribusi administrasi telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap Negara-Negara maju yang konsensus menerapkan administrasi sebagai mesin kemajuan bangsa. Pengalaman menunjukkan ketidak berhasilan Negara bersumber dari ketidak efektifan dan efisiensi proses administrasi publik, justru karena itulah administrasi dan politik tidak dapat dipisahkan meskipun memiliki ruang gerak yang berbeda. Maju mundurnya sebuah bangsa atau negara amat bergantung pada baik buruknya administrasi. (Dalam. Proceeding International Seminar).

Charle A. Beard mengatakan tidak ada satu hal dalam abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup

pemerintahan yang beradab dan bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern (dalam Syafri, 2012:3).

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut juga *amministrazione*. (dalam Syafri, 2012:3)

Administrasi terbagi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Sementara administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien (dalam Syafri, 2012:3-4).

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Siagian. 2003:2)

Administrasi defenisinya dibagi beberapa hal. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya dan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai beberapa unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilakukan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas empat, itu. Kedalam peralatan dan perengkapan juga termasuk pula waktu, tempat, peralatan, materi serta sarana lain. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena telah timbul berssama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial (dalam Siagian. 2003:2-3).

Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi

administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu organisas.

Selanjutnya menurut Willy D.S. Voll (2013;4) administrasi (*administrare*) adalah mempunyai dua arti pertama, kegiatan catat mencatat, mereka atau kompleks jabatan-jabatan yang menyelenggarakan kegiatan pencatatan termaksud pada poin pertama.

Adminstrasi merupakan upaya sadar kerjasama antar manusia yang memiliki derajat rasionalitas yang tinggi dan akhirnya akan sampai pada sebuah titik yang dinamakan tujuan (dalam Wicaksono 2014;9)

Woodro Wilson bahwa administrasi merupakan suatu bidang usaha (*a field of business*) dan harus dipisahkan dari politik (dalam Thoha 2008;9).

Menurut Leonard D. White administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik Pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil (dalam Safiie 2013;13)

Menurut Hadari Nawawi administrasi adalah adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam syafiie. 2003; 5).

Dengan demikian administras sering dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

2. Konsep Organisasi atau Organisasi Publik

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional.

Organisasi menurut Siagian (2003 : 6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi menurut Gaus adalah sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut (dalam Hamim 2005:13).

Menurut Manulang organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan (dalam Hasibuan, 2009 : 24).

Menurut Karl Weick “*Organization is defined as consensually validated grammar for reducing equivocality by means of sensible interlocked behaviors*”.

Pendapat ini menunjukkan bahwa organisasi merupakan daya upaya untuk mencapai kesepakatan yang tepat untuk mengurangi ketidak jelasan dari

hubungan perilaku yang pantas satu dengan yang lainnya (dalam Zulkifli 2005;129).

Menurut James. AF. Stoner dan R. Edwar Freeman organisasi adalah dua atau lebih manusia yang bekerja bersama-sama dengan suatu cara yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau kumpulan tujuan (dalam Amin Widjaja Tunggal 2002; 31).

Waldo organisasi merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut (dalam hamim 2005 : 13).

Siswanto (2005;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama.

Sementara E. Wight Bake mendefinisikan lebih luas tentang organisasi yaitu sebagai berikut (dalam Kusdi 2009;5):

“a continuing system of differentiated and coordinated humand activities utilizing, transforming and walding togather a specific set of human, material, capital, ideational, and natural resources in to a unique problem- solving whole engged in satisfyng particular human needs in interaction other system of human activities and resources in its environment”.

Dapat diartikan: organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinas, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatu padukan seperangkat khusus manusia, material,

model, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

3. Konsep Manajemen atau Manajemen Publik

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli dan Nurmasari 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*).

Menurut John D. Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam siswanto 2005;1)

Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta atau data secara objektif kebenarannya (dalam Badrudin 2013;2)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata (dalam George R. Terry, et.al. 2015;1)

Menurut Nick, et.al manajemen adalah “ *The process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational resources*”. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi (dalam Erni et.al 2004;7).

Koonzt dan O'donnel mengemukakan manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain (dalam Marnis, 2009;3).

Sondang P. Siagian (2003) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan di atas manajemen diartikan sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasikan dan

diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) dalam Siswanto (2005;3)

Meri Parker Fole (dalam buku Ismail Solihin 2010;3) menegaskan bahwa pada dasarnya manajemen adalah “ *The art of getting things done through people*” (seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain.

Menurut David. H. Holt manajemen adalah (dalam Amin Widjaja Tunggal 2002; 31) manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan yang mencakup manusia, material, dan sumber daya keuangan dalam suatu lingkungan organisasi

Selanjutnya Melayu S.P. Hasibuan (2001;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: Ma, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market.

Menurut G.R Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planing, organizing, actuating, dan controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula dalam Sufian Hamim (2003; 36)

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pemberdayaan, pemberdayaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya.

4. Konsep Peranan

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Selain itu peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur social masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat atau organisasi, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan organisasi. Peran berasal dari kata “Peran” yang berarti perilaku yang di atur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Bila yang diartikan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari diri orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Stogdil memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya (dalam Giroth, 2004;25).

Judistira menyatakan bahwa teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi,

teori peranan berawal dari dan mesih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (dalam Giroth, 2004;26).

Giroth (2004;27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapi artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi. Faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan oleh, norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada sekelompok/ masyarakat dalam situasi yang sama. Apabila norma itu jelas maka dapat dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya. Apabila individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari norma yang dikenakan maka ia akan berusaha mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma lain

Menurut Ndraha (2003;53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi Pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, pembeda antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain begitu juga sebaliknya, tak ada peran tanpa kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal arti, seperti setiap seseorang mempunyai macam-macam peranan berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto 2013;212-213).

Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian peranan terdapat peran kedudukan, peran ada apabila ada kedudukan, begitu pula bila ada

kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup bermasyarakat.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013;215-216) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Kewajiban adalah yang wajib, sesuatu yang harus dilaksanakan keharusan (dalam KBBI;1553).

Berdasarkan pendapat diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang diajukan oleh seseorang dan organisasi karena berkewajiban dari pekerjaan.

5. Konsep Pemberdayaan

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara kosa kata pemberdayaan adalah penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupai dengan istilah pengembangan. Menurut Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Safei “dalam, Pengembangan Masyarakat Islam” (2001; 41-42)

Menurut Kartasmita dalam (Power and Powerment. Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. 16;1996. Jakarta), mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini,

pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan dan kemampuan, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.,

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Menurut Kartasmita, dalam (Power and Powerment. Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. 16;1996. Jakarta), yaitu proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitanya dengan indikator masyarakat berdaya adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan).
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri.
3. Memiliki kekuatan untuk berunding.
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerja sama yang paling menguntungkan, dan
5. Bertanggung jawab atas tindakanya.

Pemberdayaaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepadapihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003). Begitu pula menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Secara lebih rinci Slamet (2003), menekan kan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna : paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertidak sesuai inisiatif.

Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto (2011) paling tidak memiliki empat hal, yaitu : merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung,serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat yang berada dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterpurukan. Titik tolak pemberdayaan ini sendiri adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta upaya untuk mengembangkannya. Dengan diikuti memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Dapat difahami dan diartikan bahwa pemberdayaan pengurus masyarakat merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunikasi yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik sehingga mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya. Misbahul Ulum, dkk, "dalam, Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis" (2007:120), Berdasarkan skripsi yang diarsip oleh "Firman Arief Praditya".

Sedangkan pemberdayaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa dalam meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia nya agar berdaya guna dan mampu untuk membangkitkan Koperasi yang telah dibangun guna untuk menstabilkan ekonomi desa dan meningkatkan perekonomian para petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Singingi.

Menurut Sedermayanti, yang diarsipkan oleh Weny Novrianty (2013:286), secara harfiah kata pemberdayaan dapat diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam wewenang tanggung jawab maupun kemampuan individual yang dimilikinya.

Menurut Webster dalam Sedemayanti, yang diarsipkan oleh Weny Novrianty (2013;59), pengertian pemberdayaan adalah kata Empower mengandung dua (2) arti. Pengertian pertama adalah memeberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan secara terus menerus.

Pengertian yang lebih spesifik mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sulistiayani, yang diarsipkan oleh Weny Novrianty (2004;54), pemberdayaan berasal dari kata dasar “ daya “ yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003;70-75), bahwa pemberdayaan menekankan pada proses goal, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan pada integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (self help) sesuai prinsip demokratis.

Ada 3 proses yang ditekan kan pada teori diatas, sebagai berikut :

1. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisai terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (self help).

2. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity building, yang terdiri dari pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

3. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf yang lebih baik.

6. Pelatihan Pemberdayaan

Dalam organisasi, kegiatan pelatihan merupakan aspek penting sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawainya. Begitu pula dalam kehidupan di masyarakat seperti petani atau nelayan, kegiatan peatihan, khursus tani, sekolah lapangan, atau istilah sejenis lainnya merupakan aspek penting guna meningkatkan kemampuan mereka menuju peningkatan kualitas hidupnya.

Menurut C. Kprten dan Syahrir dalam (Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta), pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baru material maupun non material melalui retribusi modal.

Sedangkan secara etimologis menurut Sulistiyani, dalam (Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, 89, 2004. Yogyakarta) yaitu, pemberdayaan berasal kata dasar yaitu “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemeberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Dalam pelaksanaan pelatihan seringkali dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Menrut Rothwell (1994) ada empat (4) permasalahan dalam pendekatan pelatihan yaitu :

- 1) Kegiatan pelatihan sering kali tidak focus terutam berkaitan dengan materi yang diberikan
- 2) Lemahnya dukungan manajemen

- 3) Pelatihan kadang tidak direncanakan dan diselenggarakan secara sistematis, dan
- 4) Materi pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan

Secara lebih rinci Bernardin dan Russel (1993) menjelaskan tiga aktivitas dalam program pelatihan yaitu : penilaian kebutuhan pelatihan (need assesment) yaitu mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan, pengembangan program pelatihan (developmen) yang bertujuan untuk merancang lingkungan dan metode-metode yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan, dan evaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan, secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Ini berarti pelatihan yang dilakukan penyuluh terhadap petani harus didasarkan pada : hasil analisis kebutuhan petani, dilaksanakan secara cermat dan melibatkan petani, dilaksanakan dengan metode dan media pelatihan yang sesuai dengan prinsip pendidikan orang dewasa, evaluasi dengan rencana, serta ada kegiatan tindak lanjut yang sesuai dengan tujuan pelatihan tersebut.

Kompetensi pengelolaan pelatihan bagi agen pemberdayaan ini meliputi: kemampuan merancang pelatihan, kemampuan melaksanakan pelatihan, kemampuan memfasilitasi narasumber, kemampuan mengevaluasi hasil pelatihan, kemampuan melakukan tindak lanjut pelatihan, serta kemampuan melibatkan masyarakat dalam tahapan pelatihan.

Pemberdayaan masyarakat umumnya direncanakan dan dilaksanakan secara komperhensif. Meminjam definisi Asian Developmen Bank (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komperhensif jika menampilkan lima karakteristik : 1). Berbasis lokal, 2). Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, 3). Berbasis kemitraan, 4). secara holistik, dan 5). Berkelanjutan (Latman, Gunarto, et al., 2004:4).

Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan oleh United National (Mangatas Tampubolon, 2001:12-13) meliputi :

1. Getting to know the local community. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
2. Gathering knowledge about the local community. Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat.
3. Identifying the local leaders. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika tidak memperoleh dukungan dari pemimpin/toko-tokoh masyarakat setempat.
4. Stimulating the community to realize that it has problems. Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.
5. Helping people to discuss their problem. Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalah serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
6. Helping people to identify their most pressing problems. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan.
7. Fostering self-confidence. Tujuan utama memberdayakan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat.
8. Deciding on a program of action. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan.
9. Recognition of strengths and resources. Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
10. Helping people to continue to work on solving their problems. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan.
11. Increasing people's ability for self-help. Salah satu pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat umumnya mencakup dua kegiatan penting (Yakub, HM, 1985). Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subjektif dan memihak kepada masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, dia menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. (76-79)

Adapun prinsip-prinsip yang tidak bisa ditinggalkan guna untuk melakukan pelatihan pemberdayaan itu sendiri. Karena Dalam melakukan pemberdayaan

kepada masyarakat,agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat di identifikasikan beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan kepada kebutuhan,masalah, dan potensi klien/sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu maka sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktifitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksan, bertahap, dan berkesinambungan
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap seluruh aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan

- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (lifelong learning/education)
- j. Pemberdayaan perlumemperhatikan adanya keragaman budaya
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan patisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya
- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan perberdayaan perlu memiliki kemampuan yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertidak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Lebih berperan sebagai fasilitator
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat. (46-60)

Dalam kondisi komunitas di pedesaan yang masih cenderung tradisional, hubungan sosial yang khas tersebut dapat dilihat dari ikatan patron-clien yang menjiwai kehidupan di komunitas tersebut. Biasanya kehidupan di komunitas tersebut di tandai dengan tahap transisi dari keadaan yang bersifat komunal tersegmentasi ke arah asosiasional terintergrasi. Dalam tahap transisi tersebut, perilaku khusus kepadawarga komunitas diperlukan supaya proses transformasi struktural-struktural dapan berjalaan dengan baik.

7. Konsep Koperasi dan KUD

Menurut sejarah Koperasi lahir karena penderitaan sebagian besar masyarakat, khususnya petani di Eropa. Pada abad ke 19 terjadi paceklik yang

berkepanjangan menimpa Negara-Negara di Benua itu, di tambah dengan datangnya musim dingin. Petani yang hidup mengandalkan alam tidak dapat berbuat banyak dan bahkan kerap kali kehabisan bahan makanan, lalu diserang berbagai macam penyakit.

Lalu atas upaya dari walikota setempatnya melakukan suatu rumusan bahwa “ Kesulitan kaum miskin hanya dapat diatasi oleh kaum itu sendiri, dengan jalan mengumpulkan modal dan kemudian meminjamkan modal tersebut kepada sesama anggota “.

Cita-cita koperasi yang amat luhur itu mestinya bisa menjadi inspirasi dan model bagi banyak orang untuk bangkit bersama melalui gerakan koperasi. Sangat relevan apabila dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 , semangat kekeluargaan menjadi dasar untuk mengatur perekonomian Negara.

Koperasi merupakan badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat umumnya. Umumnya koperasi ini dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan disebut sisa hasil usaha (SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil.

Tujuan KUD (koperasi unit desa) dalam buku “Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Koperasi/KUD” yaitu koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya

dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dari perumusan tujuan ini diperlukan :

- a. Adanya pengalangan dan pemanfaatan dana yang diarahkan untuk mencapai tujuan
- b. Harus adanya pengelolaan dana-dana yang efektif dan efisien
- c. Diperlukan adanya Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) sebagai alat pengawasan dan pengendalian

Sedangkan pengertian koperasi itu sendiri menurut Undang-Undang No. 17

Tahun 2012 menyatakan bahwasanya :

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
3. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
4. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
5. Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Kemudian dikemukakan oleh Widiyanti dan Sunindhia (2008 :1) koperasi berasal dari kata *co* dan *operatioon*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Menurut Soetjipto dalam bukunya “ Mengembangkan Koperasi “ (2015 : 35) Koperasi juga merupakan lembaga bisnis yang memiliki cirri-ciri tertentu tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya.

Adapun menurut Arifinal, Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam bukunya “Perkoperasian Indonesia“, (2005 : 25) koperasi unit desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan bernagai kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya menurut Munkner dalam bukunya “Hukum Koperasi“, (2012 : 13), koperasi adalah organisasi yang didirikan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu Undang-Undang koperasi harus memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana memupuk modal yang diperlukan untuk membiayai transaksi-transaksi usahanya.

Walujo dan Ismojowati juga mengungkapkan dalam bukunya “ KoperasiIndonesia “ (1993 :136) menjelaskan KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit Desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk Koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/koperasi-koperasi desa yang terdapat dalam wilayah unit Desa.

Kemudian juga dikemukakan oleh Hendrojogi dalam bukunya “asas-asas, teori, dan praktik“ (2010 : 46), mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang tergabung secara suka rela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang

Menurut Hans Mungker dalam bukunya “10 kuliah mengenai hukum koperasi“ (2012: 19) dalam ilmu pengetahuan di jerman koperasi menurut

pengertian ekonomi adalah organisasi-organisasi yang memiliki 4 ciri khusus berikut :

1. Adanya sekelompok orang yang terikat satu sama lain karena memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama bagi semua anggota kelompok.
2. Adanya tujuan kelompok secara keseluruhan dan tujuan anggota secara individual untuk memajukan kepentingan bersama melalui aksi bersama berdasarkan solidaritas dan upaya saling mendorong satu sama lain.
3. Adanya sarana untuk mencapai tujuan itu dalam bentuk suatu perusahaan yang dibentuk, dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama.
4. Adanya tujuan utama perusahaan bersama itu untuk memajukan kepentingan ekonomi para anggota kelompok.

Menurut Hendrojogi dalam Bukunya “ Koperasi Azas-azas, Teori, dan Praktik “ (2004 : 343) Undang-Undang Nomor . 25 Tahun 1992 Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ninik Widiyanti dalam bukunya “koperasi dan perekonomian Indonesia“ (2008 : 159), kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Menurut Ninik Widiyanti dalam bukunya “ Manajemen Koperasi “ (2010 : 72), koperasi adalah golongan masyarakat yang potensi ekonominya lemah. Ini tidak berarti yang memiliki modal tidak boleh masuk menjadi anggota koperasi, akan tetapi logika dan rakteknya, orang yang memiliki modal tidak memilih koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi. Oleh sebab itu yang dapat diterima

menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memiliki syarat-syarat kuantitas yaitu :

1. Anggota masyarakat yang mempunyai usaha.
2. Usaha itu berkaitan dengan usaha koperasi.
3. Anggota masyarakat dimaksud berada didalam lingkungan wilayah kerja koperasi yang bersangkutan.
4. Mampu melaksanakan hak dan memikul tanggung jawab sebagai anggota.
5. Mempunyai rasa individualistis, solidaritas, uotoaktivitas. Karena itu masalah anggota didalam koperasi meliputi :
 - a. Memperluas anggota koperasi
 - b. Meningkatkan kualitas anggota koperasi

Adapun menurut Widiyanti, indikasi yang muncul sebagai ciri-ciri anggota (1994 : 2000), yang berpartisipasi adalah :

1. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
2. Membantu modal koperasi disamping simpanan poko dan simpanan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Menjadi langganan koperasi yang setia.
4. Menhadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.
5. Menggunakan hak untuk mengawasi jalanya usaha koperasi, menurut anggaran dasar dan naggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lainnya dan keputusan-keputusan bersama lainnya.

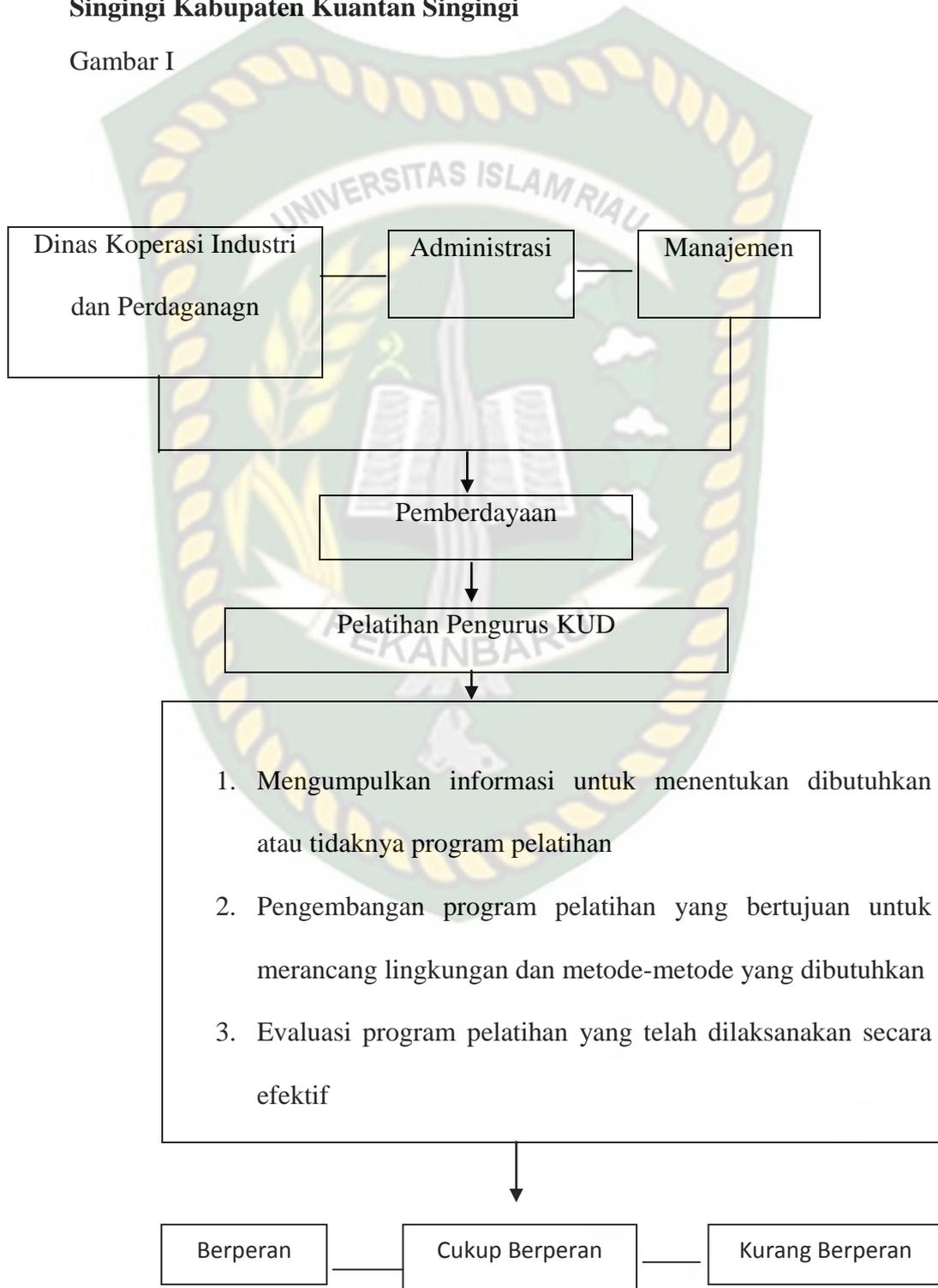
B. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini adalah membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan penelitian ini, dengan cara memaparkan keterkaitan antara variabel penelittian dengan indikator-indikator penentu, berdasarkan konsep maupun teori yang dianggap relevan, adapapun kerangka pikir tersebut disajikan seperti bagan berikut ini :

Bagan II.I. Kerangka Pikir

**Kerangka Pikir Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Gambar I



C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiono, 2003; 70)

Suatu hipotesis dapat dianggap benar apabila disertakan dengan fakta-fakta dan dibuktikan nyata. Adapun hipotesis yang penulis kemukakan bahwa diduga Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum berperan.

D. Konsep Operasional Variabel

Konsep operasional adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penulis membuat definisi-definisi agar memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan mengoperasionalkan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas permasalahan ini, yaitu :

1. Peranan merupakan sekelompok atau seseorang yang melaksanakan fungsinya ditetapkan sesuai dengan kedudukannya. Peran yang dimaksud adalah memberikan pemberdayaan dan bimbingan kepada pengurus KUD dalam meningkatkan kehidupan ekonomi anggota dan masyarakat.

2. Pemberdayaan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemajuan, pertumbuhan, evaluasi, atas kemungkinan suatu hal.
3. Pelatihan sebagai upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok kepada seseorang/kelompok lain guna untuk menjadi lebih berguna.
4. Tujuan program terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan ekonomi masyarakat tingkat pedesaan.
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ini merupakan salah satu acunya dan pedomanya.
6. Mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan yaitu Dinas terkait melakukan pengumpulan informasi-informasi yang sesuai untuk mengetahui suatu program pelatihan tersebut dapat bermanfaat atau tidak pada pengurus koperasi kedepannya.
7. Pengembangan program pelatihan yang bertujuan untuk merancang lingkungan dan metode-metode yang dibutuhkan, yaitu Dinas Koperasi dapat mengembangkan sebuah pelatihan sesuai dengan metode yang ada guna untuk dapat menaikkan kemampuan para pengurus Koperasi.

8. Evaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan secara efektif yaitu Dinas Koperasi nantinya dapat mengevaluasi apakah pelatihan yang selama ini sudah dijalankan dapat meningkatkan kualitas para pengurus kelompok tani.

E. Operasional Variabel

Tabel II.I. Operasional Variabel Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Membina Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel Dimensi	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Bernaerdin dan Russel (1993), kompetensi pengelolaan pelatihan meliputi kemampuan merancang pelatihan, melaksanakan pelatihan, memfasilitasi narasumber, mengevaluasi hasil pelatihan, melakukan tindak lanjut	Pelatihan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan 2. Pengembangan program pelatihan yang bertujuan untuk merancang lingkungan dan metode-metode yang dibutuhkan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ada tidaknya pelatihan yang diberikan Dinas kepada pengurus KUD b. Pengurus faham dengan ilmu KUD <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurus memahami teori-teori pelatihan b. Pengurus memahami tentang pentingnya pelatihan dan pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Baik - Cukup Baik - Tidak Baik <ul style="list-style-type: none"> - Baik - Cukup Baik - Tidak Baik

pelatihan, serta mampu melibatkan masyarakat dalam tahapan pelatihan		3. Evaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan secara efektif	a. Pengurus mengerti mengelola KUD b. Pengurus bisa merencanakan sebuah program-program baru Dan Pengurus dapat mengefektif dan efisien program tersebut.	- Baik - Cukup Baik - Tidak Baik
--	--	--	---	--

Sumber : Data Olah Lapangan

F. Teknik Pengukuran

Dalam setiap ilmu pengetahuan, pengukuran menghasilkan deskripsi kuantitatif dari suatu proses dan produk yang membuat kita memahami tingkah laku dan hasil. Akan semakin berkembang jika kita memilih teknik dan utilitas yang lebih baik untuk mengendalikan dan memaksimalkan kinerja suatu proses, produk dan sumber yang ada. (Pfleegeret.1997).

Menurut Lord Kelvin, ketika kalian dapat mengukur apa yang kalian katakan dengan mengekspresikannya dalam angka-angka, maka kalian mengetahui sesuatu tentang itu. Tetapi jika kalian tidak dapat mengukur dan mengekspresikannya sesuatu dengan angka-angka, pengetahuan tersebut tidak lengkap dan belum mencukupi dengan baik. (Aditya. 2010)

Maka dari itu, Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dan variabel ini dibagi 3 (tiga) kategori yaitu : Berperan, Cukup Berperan, dan Kurang Berperan. Urain dari masing-masing pengukuran ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan dalam membina pengurus KUD di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan Indikator sebagai berikut :

Berperan : Apabila seluruh indikator dalam penelitian ini telah terlaksan dengan baik dan total persentase dari jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel berada antara 67-100 %

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 indikator berada dalam katagori baik atau total persentase jawaban responden berada pada 34-66 %

Kurang Berperan : Apabila satu atau tak satu pun dari indikator variabel yang berada pada katagori baik atau total jawaban responden berada pada 33 %

2. Sub variabel dari Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan Indikator sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan

Baik : Apabila seluruh item pertanyaan dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 67-100 %

Cukup Baik : Apabila 2 (dua) dari 3 (tiga) item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66 %

Kurang Baik : Apabila hanya 1 (satu) atau tak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 33 %

b. Mengembangkan program pelatihan yang bertujuan untuk merancang lingkungan dan metode-metode yang dibutuhkan

Baik : Apabila seluruh item pertanyaan dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 67-100 %

Cukup Baik : Apabila 2 (dua) dari 3 (tiga) item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66 %

Kurang Baik : Apabila hanya 1 (satu) atau tak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 0-33 %

c. Mengevaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan secara efektif

Baik : Apabila seluruh item pertanyaan dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 67-100 %

Cukup Baik : Apabila 2 (dua) dari 3 (tiga) item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66 %

Kurang Baik : Apabila hanya 1 (satu) atau tak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut ahli penelitiandeskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu koesioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan yang lainnya (dalam Sugiono 2003;11)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif yaitu data yang dituangkan dalam bentuk angka-angka. Kemudian di reduksi dan displaykan dalam bentuk tabel frekwensi, kemudian kualitatif yaitu sebuah riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis yang mengacu pada data.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada Dinas Koperasi Indutri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di lingkungan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan situasi dan kondisi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang berhubungan dengan Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan dalam membina Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus KUD di kecamatan Sengingi dan Pegawai Kantor Koperasi, Perdagangan dan Industri Kabupaten Kuantan Sengingi. Menurut Sugiono (2003;90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini populasi dari responden penelitian ini adalah 1 orang Kepala Bagian Bidang Koperasi dan UKM, 1 orang Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi dan UKM, 1 orang Kepala Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam serta 3 orang Pengurus disetiap KUD yang ditentukan secara purposive sampling terhadap pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. .

2. Sampel

Menurut Sugiono (2003;91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sensus yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hak tertentu, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu.

Tabel III.1: Responden Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kab Kuantan Singingi

No	Responden	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase (%)
1	Kabid. Koperasi dan UKM	1	1	33,33%
2	Kasubag. Umum	1	1	33,33%
3	Kasubag. Progam dan Keuangan	1	1	33,33%
	Jumlah	3	3	100%

Sumber : Data olahan lapangan

Alasan penulis sendiri mengambil responden tersebut adalah supaya data yang diperoleh akurat, karena responden-responden sebagai sumber informasi berkaitan dengan tujuan penelitian.

Sedangkan populasi dan sampel untuk pengurus setiap KUD sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 Nama-Nama Koperasi di kecamatan Singingi:

No	Nama KUD	Alamat
1	KUD Sari Jaya	Pasir Emas
2	KUD Makarti	Sungai Keranji
3	KUD Makmur	Sungai Sirih
4	KUD Karya Agung	Sumber Datar
5	KUD Harapan Tani	Sungai Bawang
6	KUD Pratama Jaya	Sungai Kuning

7	KUD Sawit Jaya	Petai Baru
8	KUD Tirta Kencana	Air Emas

Sumber : Data Olah Lapangan

Tabel III.3 : Populasi dan Sampel Pengurus KUD di Kecamatan Singingi

No	Jenis Populasi	Alamat Desa	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase (%)
1	Pengurus KUD Sumber Jaya	Pasir Emas	7	7	30%
2	Pengurus KUD Tirta Kencana	Air Emas	5	5	21%
3	Pengurus KUD Sejahtera	Sungai Bawang	5	5	21%
4	Pengurus KUD Pratama Jaya	Sungai Kuning	6	6	28%
Jumlah			23	23	100%

Sumber : Data olahan lapangan

Alasan penulis mengambil 3 orang masing-masing kepala bagian dan kepala bidang sampling ditentukan secara purposive dari populasi sebanyak 12 orang.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang di gunakan.

Untuk Teknik Sampling ini sendiri maka peneliti menggunakan Nonprobability Sampling. Nonprobability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling adalah Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Untuk pegawai kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri menggunakan teknik sampling secara purposive “purposive sampling” Menurut Sugiyono (2014:68) bahwa Sampling Purposive Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian penentuan sampling ditentukan pada tujuan yang ingin dicapai yang dinilai relevansi bisa dijawab oleh responden yang ditunjuk.

Ditujukan terhadap personal pegawai yang memiliki relevansi dalam pembinaan, pendidikan dan latihan serta pengembangan KUD. Kemudian teknik penentuan sampel “sampling” kedua ditunjukkan kepada pengurus KUD di Kecamatan Sengingi dengan menggunakan teknik sensus yaitu sebuah proses mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota sebuah populasi. Menetapkan keseluruhan personal pengurus KUD di kecamatan ini sebagai sampel untuk dijadikan sebagai responden yaitu sebanyak 23 orang. Sampel sensus juga disebut sebagai sampling jenuh yaitu Teknik penentuan

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Berupa data umum yang belum diolah diambil dan digali dari tangan pertama untuk menjawab tujuan penelitian, ditujukan kepada personal pegawai Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Memberdayakan Pengurus KUD di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang diperoleh melalui penyebaran Quesioner (angket) dan sebagiaannya untuk lebih melengkapi dan memperdalam informasi dilakukan dengan melalui interview baik bebas maupun terstruktur

- a. Program pembinaan, pelatihan dan pengembangan KUD
- b. Proses melakukan pelatihan dan pemberdayaan KUD
- c. Kebijakan atau keputusan-keputusan organisasi berkaitan dengan pemberdayaan KUD di kabupaten ini khususnya dan Kecamatan Singingi khususnya.
- d. Informasi mengenai data jumlah KUD di Kecamatan Singingi

- e. Informasi mengenai data tugas dan fungsi maupun visi misi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa informasi dan dokumen dokumen penting atau fail-fail khusus baik diperoleh dari sumber-sumber objek penelitian seperti Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri serta KUD di kecamatan Seingingi, maupun data dan informasi lain yang dapat mendukung dan memperdalam proses analisis penelitian. Seperti :

- a. Undang-Undang dan regulasi mengenai Perkoperasian
- b. Struktur, tugas dan fungsi Dinas Koperasai, Perdagangan dan Industri Kabupaten Kuantan seningi
- c. Buku-buku petunjuk pembinaan dan Pengembangan KUD
- d. Informasi dari berbagai media termasuk jurnal, majalah atau bulletin yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan KUD khususnya dan Koperasi umumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik :

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Informasi yang digali dalam wawancara ini dalam berkaitan dengan upaya pembinaan dan pengembangan KUD.

Pendidikan dan latihan pengurus KUD untuk pemberdayaan KUD agar dapat eksis dan berkembang ditengah-tengah masyarakat desa.

2. Kuisisioner, yaitu mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawaban. Sasaran dari teknik kuisisioner ini adalah seluruh responden dalam penelitian ini. Berkaitan dengan upaya pembinaan dan pengembangan KUD. Pendidikan dan latihan pengurus KUD untuk pemberdayaan KUD agar dapat eksis dan berkembang ditengah-tengah masyarakat desa.
3. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimbau melalui pengamatan penelitian menggunakan pancaindera. Mengikuti perkembangan aktivitas sehari-hari KUD, kondisi lingkungan KUD serta reaksi masyarakat terhadap KUD di desa mereka serta produk-produk yang dihasil oleh KUD dan mekanisme kerja pengurus KUD.
4. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi atau deskripsi seperti monografi Desa dan KUD. Undang-Undang dan regulasi mengenai Perkoperasian; Struktur, tugas dan fungsi Dinas Koperasai, Perdagangan dan Industri Kabupaten Kuantan seingingi; Buku-buku petunjuk pembinaan dan Pengembangan

KUD;Informasi dari berbagai media termasuk jurnal, majalah atau bulletin yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan KUD khususnya dan Koperasi umumnya

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini kumpulkan secara kumulatif, kemudian dipilah-pilah menurut sistematika keperluan tujuan penelitian berdasarkan indikator. Kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel frekwensi dilukan analisis berupa angka-angka dan prosentase dan kemudian diperdalam dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Apabila informasi yang tersedia dinilai belum memadai maka selanjutnya penulis akan melakukan informasi terhadap informan lainya untuk bisa memperoleh data yang lebih mendalam dan valid.

Setelah data tersebut diolah, selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan terhadap data yang bersifat deskriptif dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan secara umum dari kesimpulan tersebut dapat menjawab hipotesis dan dan pada akhirnya hasil ini penelitian ini akan dapat memberikan saran-saran.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.4: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke				
		Agust-Feb	Maret	April-juni	Jul-agust	Sep-Nov
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1	Penyusunan UP					
2	Ujian UP					
3	Revisi UP					
4	Revisi Kuisioner					
5	Rekomendasi Surve					
6	Surve Lapangan					
7	Analisis Data					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)					
9	Konsultasi Revisi Skripsi					
10	Ujian Komferehensif					
11	Revisi Skripsi					
12	Penggandaan Skripsi					

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten kuansing disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Indragiri Hulu.

Gambar IV.1 : Lambang Kabupaten Kuantan Singingi



*Lambang Kabupaten Kuantan Singing
Sumber : Wikipedia*

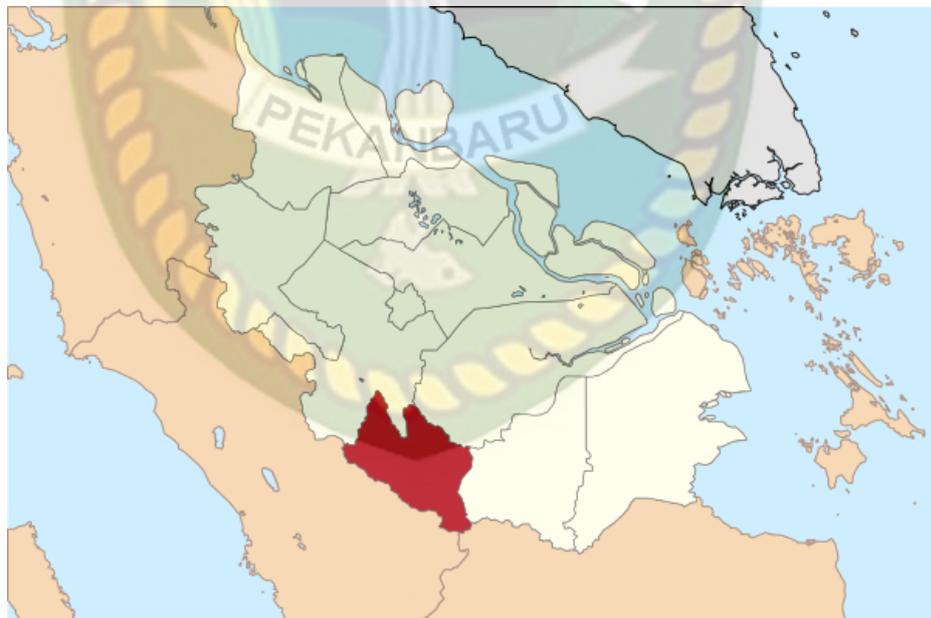
Gambar IV.2 : Kantor Bupati Kuantan Singingi



Kantor Bupati Kuantan Singingi

Sumber : Wikipedia

Gambar IV.3 : Peta Lokasi Kabupaten Kuantan Singingi



*Peta Lokasi Kabupaten Kuantan Singingi,
Kordinat: 0° LU – 1° LS dan $101^{\circ}02'$ BT – $101^{\circ}55'$ BT
Sumber : Wikipedia*

Kabupaten kuantan singingi beriklim Tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan

Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5-300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran bukit barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai kuantan dan sungai singing. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah aliran sungai (DAS) sungai kuantan mengalir Sembilan (9) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Batas wilayah untuk Kabupaten Kuantan sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Batas Wilayah

1	Utara	Kampar dan Pelalawan
2	Timur	Indragiri Hulu
3	Selatan	Jambi
4	Barat	Sijunjung dan Dharmasraya

Sumber : Wikipedia

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 oktober 1999 ditunjuk Drs. H. rusdji S. Abrus sebagai pejabat bupati Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan bupati Kuantan Singingi yang di pilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terpilihlah beliau sebagai Bupati definitive priode 2001-2006.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Adapun daftar nama bupati sejak awal berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi hingga saat ini, berikut daftarnya :

Tabel IV.2 : Daftar Nama-Nama Bupati Kuantan Singingi

No	Nama Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat
1	Rusdji S. Abrus	8 Oktober 1999	1 Juni 2001
		1 Juni 2001	Agustus 2001
2	Asrul Ja'afar	20 Agustus 2001	1 juni 2006
3	Sukarmis	1 Juni 2006	1 Juni 2011
		1 Juni 2011	1 Juni 2016
4	Mursini	1 Juni 2016	1 Juni 2021

Sumber: Wikipedia

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas dalam bidang Koperasi, Industri, dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas tersebut mengemban amanat dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, dan diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri No. 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan Koperasi.

Perkoperasian adalah suatu kegiatan yang cukup penting dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, mengingat azas-azas dan fungsi dari Koperasi yang sangat sesuai untuk mendorong perekonomian masyarakat. Pemberdayaan dan pengembangan Perkoperasian mutlak sangat diperlukan agar dapat mendorong perekonomian masyarakat.

Menurut Burhanudin Abdullah, Peranan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat, memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat di lingkungannya, menjembatani kesenjangan pendapatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan social. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya telah menetapkan tahun 2012 sebagai *International Year of Cooperative* dengan tema *Cooperative Enterprises Build Better World*.

Oleh sebab itu, pemberdayaan dan pengembangan Perkoperasian telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah, dengan menetapkan peraturan

perundang-undangan, dan juga oleh Pemerintah daerah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam upaya dan mengembangkan Perkoperasian di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan melakukan pemberdayaan terhadap koperasi-koperasi yang ada. Pemberdayaan perkoperasian adalah melakukan pemberdayaan kelembagaan, yang meliputi Organisasi dan Manajemen koperasi itu, beserta melakukan pemberdayaan yang meliputi pendidikan dan pelatihan.

Pemberdayaan manajemen usaha koperasi dilakukan agar para pengelola usah koperasi mendapatkan bekal pengetahuan dan keahlian untuk mengelola Organisasi Koperasi dan untuk mengembangkan Koperasinya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini melaksanakan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola koperasi yang ada di Daerah tersebut, yang meliputi pelatihan tentang pelatihan manajemen Koperasi, pelatihan akuntansi koperasi, dan pelatihan simpan pinjam.

C. Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 15 Tahun 2010 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun susunan Organisasi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris

3. Kepala Bidang Koperasi dan UKM
4. Kepala Bidang Industri
5. Kepala Bidang Perdagangan

Adapun uraian tugas Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan dibidang Koperasi, Industri, dan Perdagangan.
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas bagiasn Sekertariat, Bidang Koperasi, Bidang Industri, dan Bidang Perdagangan.
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Koperasi Indutri dan Perdagangan.
- e. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- f. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang telah di rencanakan.

2. Sekertaris

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan di Bidang Sekertariat penyusunan dan pelaporan. Berikut tugas-tugasny :

- a. Melaksanakan tertib administrasi ketatausahaan.
- b. Melaksanakan penatausahaan di bidang kepegawaian dan pemberdayaan pegawai.
- c. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran, monitoring, evaluasi, dan laporan keuangan baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.
- d. Melaksanakan penatausahaan di bidang perlengkapan, inventaris kantor dan kerumahtanggaan.
- e. Melaksanakan pemberdayaan ketertiban, kebersihan, keamanan kantor, dan pemberdayaan Organisasi.
- f. Melaksanakan kegiatan hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, pers, publikasi, dan Dokumenter atas perintah pimpinan.
- g. Mengkoordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bagian/bidang.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang dan tugasnya :

1) Kepala Sub Bagian Program

Melaksanakan kegiatan, menyimpulkan dan mengolah bahan dalam penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Rincian Tugas:

- a) Mempersiapkan, mengolah, merumuskan, melakukan koordinasi perencanaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana dan program pengembangan perindustrian perdagangan dan koperasi.

- c) Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data untuk mendukung pengembangan perindustrian perdagangan dan koperasi.
- d) Menyusun laporan bulanan, tahunan, pelaksanaan tugas dinas dibidang pengembangan perindustrian perdagangan dan koperasi serta dibidang ketatausahaan.
- e) Mempersiapkan rapat koordinasi dinas dibidang pengembangan perindustrian perdagangan dan koperasi.
- f) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Sub Bagian Umum

Melaksanakan kegiatan mengumpulkan dan mengolah bahan dalam menyiapkan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan kearsipan.

Rincian tugas :

- a) Mengumpulkan surat-surat masuk, melakukan/mengagendakan surat-surat masuk dan keluar Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b) Mengolah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melaksanakan surat menyurat pada Dinas Koperasi, Industri dan perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.
- d) Menyelenggarakan tertib administrasi kepegawaian antara lain dalam pembuatan :
 - a. Daftar Urutan Pengangkatan (DUK).

- b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)
- c. Mempersiapkan surat keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai.
- e) Mempersiapkan usulan motivasi pegawai.
- f) Melaksanakan pemberdayaan disiplin. Mental dan peningkatan kesejahteraan pegawai pensiunan janda/duda dan anak yatim/piatu.
- g) Mengelola dan melaporkan keuangan
- h) Mengelola inventaris barang-barang dinas
- i) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Umum bertanggung jawab kepada Kepala Sekertaris.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Sub Bagian Keuangan

Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan dan mengolah dalam menyiapkan rancangan produk hukum pada pinjaman, hubungan masyarakat, pemberdayaan organisasi dan tatalaksana.

Rincian Tugas :

- a) Mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) pada ordonatur Daerah berdasarkan DPA dan SPD untuk memperoleh uang dalam rangka mengadakan pembayaran.
- b) Mencatat seluruh penerimaan (SPMU/pajak PPN, PPH) yang diterima serta mencatat pengeluaran berdasarkan bukau kwitansi yang sah pada buku kas.
- c) Menyelenggarakan pelunasan tagihan yang sah atas persetujuan pengguna anggaran/atasan langsung.

- d) Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu secara tertib dan teratur.
- e) Membuat laporan mengenai keuangan yang diurusnya serta membuat perhitungan/pertanggung jawaban mengenai uang yang ada didalam pengurusannya kepada kepala daerah setiap bulannya.
- f) Bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya dan bertanggung jawab atas kebenaran dari pada seluruh tanda bukti pengeluaran yang dilakukannya, serta bertanggungjawabkan dalam hal kerugian, ketekoran kas dan keselamatan uang daerah tersebut.
- g) Mengajukan SPP dan lampiran lainnya kepada ordinatur daerah berdasarkan DPA dan SPD dalam rangka mengadakan pembayaran.

3. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, pengembangan kelembagaan dan bimbingan usaha perkoperasian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Memuaskan rencana dan program operasional pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).
- b. Menyusun pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan kelembagaan dan uaha koperasi dan UKM.
- c. Menjabarkan petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM

- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi sektoral yang terkait dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKM.
- e. Mengevaluasi hasil penelaahan subdin koperasi dan UKM tentang permohonan bantuan koperasi dan UKM untuk pengembangan usaha.
- f. Memonitor pelaksanaan perkembangan pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM.
- g. Mengevaluasi laporan kegiatan kelembagaan usaha koperasi dan UKM.
- h. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepala diligkungan dinas perindustrian dan koperasi.
- i. Memimpin dan mengadakan rapat berkala dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada poin (a s/d h)
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang.
- k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam pengembangan pemasaran produk koperasi dan UKM.
- l. Melakukan tugas-tugas lain atas petunjuk kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan.
- m. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Koperasi dan UKM bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.

1) Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Kemitraan

Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, pengembangan kelembagaan dan usaha kemitraan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Rincian Tugas :

- a) Menyusun rencana dan pedoman teknis tentang tata cara pendirian atau pembentukan dan pengesahan serta perubahan anggaran dasar dan perubahan koperasi.
 - b) Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis tentang pengembangan koperasidan UKM.
 - c) Melakukan inventarisasi jumlah koperasi dan UKM menurut jenisnya.
 - d) Menyusun pedoman dan program dalam rangka melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan teknis serta mengevaluasi tingkat kesehatan koperasi dan UKM menurut jenisnya.
 - e) Memantau pelaksanaan rapat tahunan dalam rangka tertib organisasi koperasi.
 - f) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainya dan instansi terkait dalam rangka pengembangan koperasi dan UKM.
 - g) Menyiapkan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.
 - h) Memberikan dan memimpin petunjuk teknis kepada bawahan.
 - i) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam pengembangan pemasaran produk usaha kecil menengah.
 - j) Dalam melaksanakan tugas kepala seksi bina kelembagaan koperasi dan kemitraan bertanggung jawab kepada kepala bidang koperasi dan UKM Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan.
- 2) Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi dan UKM

Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pengembangan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Rincian Tugas :

- a) Menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b) Memfasilitasi peningkatan usaha dan kerja sama Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan swasta, BUMN dan BUMD
- c) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam pengembangan pemasaran produk Koperasi dan UKM
- d) Mempersiapkan penyusunan rencana dan program pemberdayaan dan bimbingan pengembangan koperasi dan UKM di Kuantan Singingi
- e) Memonitor dan menganalisa pengembangan pelaksanaan rencana dan program pemberdayaan dan bimbingan
- f) Melakukan penyempurnaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan jaringan usaha Koperasi dan UKM
- g) Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha Koperasi dan UKM
- h) Mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasikan data sarana dan prasarana Koperasi dan UKM dibidang produksi dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UKM

- i) Melakukan tugas-tugas lain, atas usulan dan petunjuk kepala sub Dinas Koperasi dan UKM
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Koperasi

3. Kepala Seksi Fasilitas pemberdayaan dan Simpanpin Pinjam

Melaksanakan kegiatan dan pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pengembangan sarana dan prasarana, dukungan dan bantuan pembiayaan dan simpan pinjam.

Rincian Tugas :

- a) Merumuskan rencana dan program operasional penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan fasilitas pembiayaan bagi Koperasi dan UKM
- b) Menyusun bahan tentang penilaian kebutuhan modal usaha bagi Koperasi UKM dan simpan pinjam
- c) Menetapkan prosedur bantuan modal, penyediaan bantuan modal, penyediaan jasa keuangan bagi Koperasi, UKM dan simpan pinjam
- d) Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja, baik didalam maupun diluar lingkungan dinas perindustrian perdagangan dan koperasi dalam pemberdayaan dan penyediaan dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka meningkatkan modal usaha Koperasi, UKM dan simpan pinjam
- e) Menetapkan persyaratan teknis perkoperasian UKM dan simpan pinjam di Kuantan Singingi
- f) Melakukan penilaian terhadap akuntabilitas Koperasi yang ada di Kuantan Singingi
- g) Menetapkan prosedur pemeriksaan akuntabilitas koperasi

- h) Melakukan pemberdayaan dan penyediaan dukungankerja sama dan bantuan dalam rangka peningkatan akuntabilitas Koperasi, UKM di Kabupaten Kuantan Singingi
- i) Memonitoring dan mengevaluasi permodalan koperasi baik bersumber modal sendiri maupun dari luar seperti perbankan, kredit program, modal penyertaan, subsidi BBM berasal dana bagian laba BUMN serta modal bantuan lainnya
- j) Memberikan petunjuk tentang prosedur pemberian rekomendasi permodalan kepada Koperasi, UKM dan simpan pinjam
- k) Memimpin dan memberikan petunjuk teknispelaksanaan kepada bawahan di seksi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam
- l) Menyiapkan bahan perangkaan koperasi, UKM dan simpan pinjam dibidang jasa dan keuangan
- m) Menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam
- n) Melaksanakan tugas lain atas petunjuk atasan
- o) Dalam rangka melaksanakan tugas kepala seksi fasilitas pembiayaan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM

4. Kepala Bidang Industri

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan usaha dan sarana industri.

Untuk melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja program pembangunan industri

- b) Mendorong terciptanya koordinasi integrasi dan sinkronisasi kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan industri
 - c) Menyusun kebijaksanaan teknis pemberdayaan, pengembangan dan pengawasan industri
 - d) Menyiapkan bimbingan teknis pemberdayaan dan sarana usaha dan produksi pada sub dinas industry
 - e) Mensosialisasikan penerapan petunjuk teknis dan pemberdayaan, pengembangan dan pengawasan industry
 - f) Menganalisa iklim usaha dan kerja sama dengan dunia usaha industry
 - g) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan teknis terhadap industry
 - h) Membina dan mengandalikan mutu hasil industry, pencemaran lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi
 - i) Mengadakan kerja sama usaha industry dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan industry
 - j) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta mengawasi dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum yang terkait bidang industri
 - k) Mengupayakan sosialisasi penyelesaian masalah yang terkait bidang industry
 - l) Menyusun laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memberikan pelayanan teknis dibidang industry
 - m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.
- 1) Seksi Bina Usaha Industri

Melaksanakan kegiatan dan pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan pengarah teknologi, pengembangan usaha industry sarana dan produksi bimbingan dan penyuluhan pengembangan industry kecil dan kerajinan.

Rincian tugas :

- a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
 - b. Menyusun rencan kegiatan seksi industry kecil dan kerajinan sebagian acuan pelaksanaan tugas
 - c. Membagi tugas kepada staf seksi sesuai dengan bidangnya
 - d. Menyiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis pemberdayaan dan peningkatan keterampilan pengusaha industry kecil dan kerajinan
 - e. Melaksanakan pekerjaan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan industry kecil dan kerajinan
 - f. Mengkaji peluang pengembangan, membantu penanggulangan masalah yang dihadapi pengusaha kecil dan pengerajinan
 - g. Mengadakan kerjasam kemitraan dengan pihak-pihak tertentu dalam rangka pengembangan industry kecil dan kerajinan
 - h. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan teknis pemberdayaan dan pengembangan industry kecil dan kerajinan
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi industry kecil dan kerajinan sebagai penanggung jawaban
- 2) Seksi pemberdayaan Pengembangan Permodalan dan Kerjasama Industri

Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, mengumpulkan dan mengelolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan pemberdayaan pengembangan permodalan dan kerjasama industry

Rincian tugas :

- a) Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas
 - b) Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan pengembangan permodalan dan kerjasama industry
 - c) Membagi tugas kepada staf seksi sesuai bidangnya
 - d) Memberikan fasilitas usahan dalam rangka pengembangan industry kecil menengah
 - e) Mempromosikan produk industry di Kabupaten Kuantan Singingi
 - f) Memfasilitasi akses permodalan bagi industry melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Kabupaten Kuantan Singingi
 - g) Pelaksanaan hasil-hasil kerja sama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk memberdayakan industry di Kabupaten Kuantan Singingi
 - h) Memfasilitasi kemitraan antara industry kecil, menengah dan industry besar serta sektoral ekonomi lainnya
 - i) Pembinaan asosiasi industry
 - j) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk atasan
- 3) Seksi Pengawasan Industri

Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan dalam menyiapkan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Rincian tugas :

- a) Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
- b) Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan industry sebagai acuan pelaksanaan tugas
- c) Menyusun RPJM dan RPJP bidang industry
- d) Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standarisasi industry yang akan dikembangkan
- e) Menyusun tata ruang industry dalam rangka pengembangan pusat-pusat industry yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana prasarana untuk industry yang mengacu pada tata ruang regional
- f) Memberikan perundang-undangan kepastian berusaha terhadap usaha industry
- g) Pengumpulan, analisis dan desiminasi tata bidang industry tingkat dan pelaporan pada provinsi
- h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industry tingkat kabupaten
- i) Monitoring evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintah di bidang industry
- j) Pembinaan industry dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry
- k) Membagi tugas kepada seksi sesuai dengan bidangnya

5. Kepala Bidang Perdagangan

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan, penyelenggaraan perdagangan., kemetrolagian, penyaluran mata perdagangan, pendaftaran perusahaan dan penyuluhan kepada produsen, perdagangan dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja sub Dinas Perdagangan
- b. Mendorong terciptanya koordinasi integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perdagangan
- c. Mensosialisasikan kebijakan, membina mengembangkan dan mengawasi usaha perdagangan
- d. Menganalisa kebijakan membina mengembangkan dan mengawasi usaha perdagangan
- e. Mengadakan kerjasama/kemitraan usaha perdagangan kecil, menengah usaha besar
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas sub Dinas perdagangan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- h. Dalam melaksanakan tugasnya kepala sub Dinas perdagangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Rincian tugas :

- a) Pemberian izin usaha perdagangan

- b) Pemberdayaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi
- c) Pemberdayaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten
- d) Pengawasan, pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan serta penyajian
- e) Pemberdayaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di Daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil
- f) Pemeberdayaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan skala local
- g) Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor
- h) Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor
- i) Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor
- j) Menyediakan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal dan penelusuran asal barang
- k) Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal penelusuran asal barang
- l) Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Import
- m) Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Import
- n) Pemberdayaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.

SKEMA ORGANISASI DINAS KOPERASI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Sumber: Kantor Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang cukup berperan penting di sini adalah adanya responden, dalam mengangkat masalah dan menjawab hasil penelitian tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Data- data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari beberapa pengurus Dinas Koperasi dan juga beberapa pengurus KUD yang ada di Kecamatan Singingi, penelliti juga telah melakukan wawancara terhadap Kasi Koperasi yang ada pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan. Peneliti pun telah menyebarkan beberapa kuisisioner yang berjumlah 26 responden, responden ini sendiri terdiri dari beberapa pengurus KUD dan pegawai Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan.

Berhubungan dengan penelitian tersebut, maka penulis akan memaparkan kriteria responden yang dimintai informasinya di mulai dari Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun hasil dari beberapa responden saat dimintai informasinya, peneliti telah mendata beberapa responden dan mengklasifikasikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Berikut data yang peneliti dapat :

Tabel V.1 : Klasifikasi Menurut Jenis Kelamin

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	14	61 %
2	Perempuan	9	39 %
	Jumlah	23	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Pada tabel V.1 diatas dijelaskan bahwa responden penelitian tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi di doinasi oleh Laki-laki yang berjumlah 14 responden dengan capaian persentase sebesar 61%, selebihnya yaitu dengan jumlah 9 responden dengan klasifikasi perempuan berjumlah 9 responden dengan capaian persentase sebesar 39%, dari total keseluruhan responden mencapai 23 responden dengan persentase 100%.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa responden mayoritas adalah Laki-laki, hal tersebut dapat di lihat dari hasil tabel yang berjumlah 14 orang dengan persentase mencapai 61% dan selebihnya adalah argument.

2. Identifikasi Responde Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa DiKecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dapat di klasifikasi be

rdasarkan latar belakang usia (umur), sebagaimana tabel Responden berikut ini

:

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30	5	22%
2	31-40	6	26%
3	41-50	8	35%
4	>50	4	17%
Jumlah		23	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Pada tabel V.2 diatas dijelaskan bahwa responden penelitian tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi di dominasi oleh responden yang berusia 41-50 tahun, dengan total responden berjumlah 10 responden dengan capaian persentase sebesar 43%, selanjutnya di posisi kedua dengan responden berusia 31-40 tahun yaitu dengan jumlah 8 responden dengan capaian persentase sebesar 35%, kemudian diposisi ketiga di tempati oleh responden dengan kisaran usia 20-30 tahun dengan capaian persentase sebesar 22%. Maka dengan semua total responden yang berjumlah 23 orang maka persentase yang di dapat adalah sebesar 100%.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa responden mayoritas berusia 41-50 tahun dengan total responden berjumlah 10 responden dan jika di persentasekan sampai 43%.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang akan diberikan oleh responden, ada kecenderungan semakin tinggi pendidikan responden maka semakin mendalam informasi yang akan di dapatkan serta

penjelasan yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang disajikan oleh peneliti. Jawaban yang diberikan oleh responden memberikan efek baik dari hasil penelitian yang mana nantinya berguna untuk perkembangan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan.

Dalam hasil penelitian tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti mengklasifikasikan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh beberapa responden, dari tingkat SD, SMP, SMA, S1 maupun seterusnya. Untuk itu berikut tabel keadaan pendidikan responden :

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	-	-
2	SMP	4	17,40%
3	SMA	16	69,56%
4	SI	3	13,04%
Jumlah		23	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2019

Tabel V.3 di atas bahwa responden penelitian tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari tamatan SMP ada 3 responden dengan persentase sebesar 17%. Kemudian untuk responden tamatan SMA berjumlah 16 responden atau sama dengan 70% dan jumlah responden

untuk tamatan S1 yaitu berjumlah 3 responden jika di persentasekan sebesar 13%. Dari responden sebanyak 23 responden.

Maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya, Responden yang mendominasi adalah responden jumlah terbesar berada pada tingkat pendidikan SMA, yaitu sebanyak 16 responden atau sama dengan 70%.

B. Tanggapan Responden Tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan manusia seutuhnya, yang makmur dan sejahtera serta mampu mandiri secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikannya adalah dengan melaksanakan pembangunan dan pergerakan ekonomi dari bawah yang bersifat merakyat.

Karena mau bagaimana pun, suatu perekonomian nasional bisa dinilai baik apabila perekonomian di bawah itu stabil dan mampu berkembang dengan baik. Bisa di ibaratkan seperti sbuah pohon, jika pohon tersebut ingin terlihat tumbuh subur maka pohon tersebut harus dirawat mulai dari akar hingga ke batang-batang pohon. Karena mau bagaimana pun akar merupakan sumber kehidupan bagi sang pohon, jika akar nya sudah tidak berfungsi maka pohon tersebut pun akan mati. Begitu lah roda perekonomian, kita harus mulai dari rakyat. Jika rakyatnya bisa menjalankan perekonomian dengan baik maka baik pula perekonomian nasional bahkan internasional kita.

Untuk menerapkan perekonomian berbasis kerakyatan tersebut, maka Pemerintah Indonesia pun turut berperan aktif untuk membentuk suatu lembaga

yang paling sesuai untuk mengembangkan sistem perekonomian yang di mulai dari bawah yaitu Koperasi. Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dimana isi dari Undang-undang tersebut sesuai dengan Bab II Pasal 4 yaitu “Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan sekaligus sebagai tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Sebelumnya pada pasal 1 Undang-undang tersebut telah menyatakan bahwasanya Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dapat dilihat pula dari penjelasan yang telah tercantm pada Undang-undang tersebut bahwasanya Koperasi ini bergerak berasaskan sistem kekeluargaan yang mana bersifat mementingkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, tidak seperti pelaku ekomoni yang lain yang hanya bersifat mencari keuntungan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi atau individual.

Oleh sebab itu, maka Pemerintah Daerah telah berupaya mendorong agar usaha Koperasi dapat berkembang dengan baik di tengah-tengah masyarakat, melalui perangkat daerah yang dibentuknya. Untuk itu, Pemerintah Derah Kabupaten Kuantan Singingi sendiri telah membentuk suatu Dinas yang mana untuk menaungi beberapa Koperasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Dinas Koperasi dan UKM.

Melalui Dinas Koperasi dan UKM ini lah maka Pemerintah daerah menerapkan beberpa program dan kebijakan untuk menjalankan dan membangkitkan roda perekonomian kerakyatan di setiap Desa-desa, salah satunya yaitu di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Singingi. Telah terbentuk beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang berfokus pada perkebunan Kelapa Sawit, yang mana denga adanya KUD tersebut bisa manaungi para petani kelapa sawit dari penjualan buah kelapa sawitnya agar tidak terlalu melonjak dari harga pasar. Dengan begitu para petani kelapa sawit pun bisa memperbaiki perekonomiannya.

Oleh sebab itu, maka Dinas Koperasi dan UKM pun telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan perkembangan KUD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan singi dengan cara melakukan pemberdayaan, yang salah satunya demi meningkatkat Sumber Daya Manusia nya (SDM). Beberapa upaya yang telah dilakukan Oleh Dinas tersebut yaitu Salah satunya pemberian beberapa pelatihan yang di antaranya adalah :

1. Pelatihan Simpan Pinjam (KSP)
2. Pelatihan Akutansi Koperasi
3. Pelatihan Administrasi dan manajemen

Menurut keterangan dari Hendri Raham SE, Kasi Koperasi pada Dinas tersebut mengatakan“ semua KUD memang diberikan pemberdayaan dengan merata, hanya saja dalam waktu dan tempat kegiatan itu tidak sama. Karena pihak Dinas memberikan pelatihan-pelatihan terhadap KUD-KUD tersebut pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh KUD tersebut dan tidak terjadwalkan. Ada

beberapa poin yang kami tidak bisa sebutkan dalam wawancara ini yaitu tentang mengenai sumber modal, karna itu ranah pribadi dan harus ada persetujuan dari atasan” (14/06/19).

Adapun Jenis-jenis pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan kepada pengurus KUD adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan pada pengurus seperti:

a. Pelatihan Simpan Pinjam KSP/USP

Pengertian dari pelatihan simpan pinjam itu sendiri adalah “ suatu pelatihan simpan pinjam yang mana merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. (dalam KBBI)

b. Pelatihan Akutansi Koperasi

Pelatihan akutansi adalah bertujuan untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar dengan standar akuntansi yang berlaku. (dalam KBBI)

c. Pelatihan Manajemen Koperasi

Pelatihan manajemen koperasi ini adalah untuk melatih pengelolaan koperasi bagi pengurus koperasi guna membangun wawasan pengetahuan tentang cara bagaimana membagi suatu pekerjaan, mengendalikan, mengurus, dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan secara akurat dan optimal. (dalam KBBI).

Oleh sebab itu, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan melakukan suatu pemberdayaan ini di sesuaikan dengan fungsi dan tugas struktur Organisasi yang ada di dalam kantor Dinas Koperasi Industri dan perdagangan itu sendiri. Yang melakukan tugas untuk melakukan pelatihan itu sendiri yaitu Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

Ini lah beberapa fungsi dan tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM untuk mewujudkan terciptanya cita-cita yang ada didalam Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, salah satunya yaitu Pemberdayaan terhadap Koperasi dan UKM yang ada, khususnya di Kecamatan Singingi itu sendiri.

Ketiga upaya ini lah yang sedang giat dilakukan oleh Dinas tersebut untuk dapat mengembangkan beberapa KUD yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian untuk mengumpulkan beberapa informasi penelitia pun telah menyebarkan beberpa kuisisioner yang berkaitan denga pemberdayaan dengan cara pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu :

1. Mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan
2. Pengembangan program pelatihan yang bertujuan untuk merancang lingkungan dan metode-metode yang dibutuhkan
3. Evaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan secara efektif

Ketiga cara ini lah yang akan di fokuskan oleh peneliti untuk dapat mencari informasi, apakah benar Dinas Koperasi dan UKM telah berjalan sesuai dengan ketentuan visi dan misi yang telah mereka buat.

A. Mengumpulkan Informasi Untuk Menentukan Dibutuhkan Atau Tidaknya Program Pelatihan

Menurut Bernardin dan Russel (1993) menjelaskan ada 3 aktivitas dalam program pelatihan. berikut yang pertama yaitu mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan, kemudian untuk yang ke dua dan ketiga akan di jelaskan pada poin berikutnya.

Mengumpulkan informasi adalah kegiatan menghimpun informasi atau data yang diperlukan di objek pengembangan KUD untuk mempersiapkan perencanaan DIKLAT dan pengembangan KUD. Salah satu tahap awal saat ingin melakukan pengumpulan informasi kita harus berangkat dari tahapan awal yaitu perencanaan, Karena mau bagaimana pun perencanaan sangat lah penting. Karena didalam mengumpulkan informasi-informasi tersebut lah akan muncul perencanaan-perencanaan, Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok yang ada di dalamnya.

Tahapan awal dalam melakukan aktivitas sebuah lembaga atau organisasi lain itu di mulai dari adanya perencanaan. Perencanaan merupakan cara untuk mengetahui keadaan yang saling bergantung sehingga mencegah atau mengurangi kesulitan dalam tahap mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi ini sendiri merupakan pengumpulan seluruh ragam dan cara untuk memperoleh berbagai dokumentasi informasi, oleh sebab itu maka peneliti disini ingin menghimpun berbagai informasi kepada beberapa pengurus KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi guna untuk mengetahui, apakah Dinas Koperasi dan UKM sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar,

husus dalam segi pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Indikator pemberdayaan yang menjadi penilaian dalam penelitian adalah kegiatan mengumpulkan informasi. Maksudnya adalah usaha menghimpun informasi yang dilakukan oleh Dinas sebelum melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk pemberdayaan pengurus KUD di kecamatan Sengingi. Untuk itu ditampilkan hasil penelitian berkaitan dengan indikator di atas sebagaimana Tabel V.4 berikut ini.

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Mengumpulkan Informasi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan inventarisasi	2 (8,70%)	8 (34,78%)	13 (56,52%)	23 (100%)
2	Meminta Masukan Kepada Pengurus KUD	5 (21,74%)	9 (39,13%)	8 (34,78%)	23 (100%)
3	Saling Melakukan Pertukaran Informasi	5 (21,74%)	10 (43,48%)	13 (56,52%)	23 (100%)
4	Perkembangan KUD 2 tahun terakhir	13 (56,52%)	10 (43,48%)	0 (0)	23 (100%)
5	Sudahkah pengurus KUD faham ilmu Koperasi	16 (69,56%)	3 (13,04%)	4 (17,40%)	23 (100%)
Jumlah		41	40	34	115
Rata-Rata		8,2	8	6,8	23
Persentase		35,65%	34,79%	29,56%	100%

Sumber : Data Penelitian

Dari tabel V.4 diatas mengenai indikator mengumpulkan informasi untuk program pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap beberpa pengurus KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dapat di ketahui bahwa dari 23 orang yang peneliti lakukan sebagai responden untuk item Pertama yang di nilai tentang “ meminta masukan kepada pengurus KUD”, dalam kategori penilaian baik dengan jumlah 5 orang dengan persentase sebesar 21,74%. Dengan berbagai macam alasan, pengurus KUD ada yang selalu inisiatif untuk slalu dapat menyampaikan keluhan-keluhan kepada Dinas terkait sehingga Dinas terkait mencari akar masalah dan meminta masukan kepada pengurus agar dapat diberikan pelatihan sesuai dengan apa yang di butuhkan, akan tetapi ada beberpa KUD yang bahkan tidak menerima pelatihan.

Untuk kategori penilaian cukup baik berjumlah 9 orang responden dengan persentase 39,13%, Dengan berbagai macam alasan, ada yang mengatakan bahwa KUD mereka jarang mendapatkan pelatihan dari Dinas terkait, sehingga mereka jarang mendapatka informasi apalagi Dinas terkait meminta masukan kepada pengurus KUD. Karena mereka menganggap tidak semua KUD mendapatkan pelatihan dan belum tentu dalam 1 tahun mereka mendat pelatihan. Untuk jawaban kategori kurang baik berjumlah 9 orang responden dengan persentase 39,13, dengan alasan yang hampir sama dengan kategori cukup baik, hanya saja di kategori ini pengurus mengatakan jangankan meminta masukan, bahkan untuk kunjungan ataupun kegiatan pelatihan mereka hampir tidak pernah dalam 3 tahun terkahir ini.

Untuk item pertanyaan yang Ke Dua yang dinilai tentang “ tentang pertukaran informasi”, dalam kategori penilain Baik berjumlah 5 orang dengan persentase 21,74%. Untuk kategori penilain cukup baik di sini berjumlah 10 orang responden jika di persentase kan sekitar 43,48%. Kemudian untuk kategori kurang baik se,ua berjumlah 8 orang responden atau sama dengan 34,78%. Untuk pertanyaan kedua ini di dominasi dengan jawaban cukup baik, dimana dengan berbagai macam alasan, yang bisa di simpulkan bahwa pengurus mengatakan tidak terlalu sering Dinas terkait melakukan pertukaran informasi, kecuali memang ada kebutuhan saja.

Untuk pertanyaan ke Tiga tentang “ melakukan inventarisasi”, untuk penilaian kategori baik responden hanya berjumlah 2 orang responden atau sama dengan 8,70% saja. Kemudian untuk kategori cukup baik responden berjumlah 8 orang responden jika di persentasekan sama dengan 34,78%, sedangkan untuk kategori kurang baik itu cukup banyak sekitar 13 orang responden jika di persentase kan sama dengan 56,52%. Dengan demikian dalam pertanyaa ketiga ini di dominasi oleh kategori”Kurang Baik”, dengan alasan para rsponden kurang memahami apa itu inventarisasi, sehingga mereka mengatakan tidak tahu apakah Dinas terkait mernah melakukan inventarisasi.

Untuk pertanyaan ke Empat yaitu tentang “ perkembangan KUD untuk 2 tahun terkahir”. Dalam kategori baik para responden menjawab sekitar 13 orang responden dengan persentase sebesar 56,52%, kemudian untuk kategori cukup baik dengan jumlah responden 10 orang respondenatau sama dengan 43,48%. Untuk kategori kurang baik sendiri para responden tidak ada menjawab sama sekali. Jadi

untuk pertanyaan ke empat ini mayoritas responden menjawab baik, dengan alasan mereka menganggap KUD mereka memang sedang mengalami kemajuan untuk 2 tahun terakhir ini, kecuali KUD yang memang sedang tidak aktif.

Pertanyaan ke Lima, dengan pertanyaan “sudahkah pengurus KUD faham ilmu Koperasi”, disini para responden yang berjumlah 23 orang responden telah menjawab yang mana dari 23 responden tersebut 16 di antaranya telah menjawab dengan kategori baik dengan persentase 69,56%, kemudian di kategori cukup baik berjumlah 3 orang rsponden dengan persentase 13,04 dan yang terakhir di kategori kurang baik berjumlah 4 orang responden atau sama dengan 17,40%. Berbagai macam alasan yang di kemukakan, tapi di sini penulis menilai bahwa, setiap pengurus mengatakan merea sudah faham tentang ilmu-ilmu perkoperasian, baik dari pembukuan maupun dengan masalah pengaturan internal mereka.

Berikut adalah penjelasan tentang tabel V.4 tentang “mengumpulkan informasi”, berdasarkan hasil dari tabel rekapitulasi tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban yang paling mendominasi dari indikator pertama yaitu berada pada kategori Baik dengan jumlah responden menjawab sebanyak 41 orang responden dengan rata-rata 8,2 atau dengan persentase mencapai 35,65%. Kemudian di posisi selanjutnya responden menjawab dengan kategori cukup baik dengan jumlah responden 40 orang responden dengan rata-rata 8 dengan pencapaian persentase 34,79%. Selnjutnya untuk kategori kurang baik hanya ada 34 orang responden dengan rata-rata 6,8 pencapaian persentase 29,56%.

Jawaban-jawaban yang telah peneliti dapatkan juga di lengkapi dengan hasil wawancara dengan pengurus Dinask Koperasi dan UKM, tepatnya pada tanggal 19

Juni 2019 dengan Bapak Hendri Raham, SE yang menjabat sebagai Kasi Koperasi, mengatakan :

“Memang dalam menjalankan tugas nya setiap Dinas selalu memulai dengan mengumpulkan berbagai macam informasi di setiap KUD-KUD di setiap desa. Dari informasi tersebut lah nanti Dinas turun kelapangan untuk melakukan penyuluhan, dan pelatihan kepada KUD-KUD sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi memang tidak setiap KUD bisa langsung di datangi dan di berikan penyuluhan karena banyak berbagai macam alasan yang tidak bisa disebutkan. Untuk pastinya mengumpulkan informasi itu memang sering dan sangat di perlukan untuk Dinas melakukan langkah-langkah selanjutnya”.

Berdasarkan dari jawaban responden tersebut, dari pengamatan peneliti lakukan dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi masih ada kekurangannya, yaitu masih kurang meratanya Dinas memerikan pemberdayaan berupa pelatihan, sehingga masih ada beberapa KUD yang merasa kurang di perhatikan oleh Dinas sehingga ada beberapa KUD yang kurang aktif sehingga dalam menjalankan aktifitas perkoperasian bisa di bilang seadanya, contohnya sesuai dengan sampel yaitu :

- 1) Kud Sumber Jaya (Desa Pasir Emas)
- 2) Kud Tirta Kencana (Air Emas)
- 3) Kud Harapan Tani (Sungai Bawang)
- 4) Kud Pratama Jaya (Sungai Kuning)

B. Pengembangan Program

Menurut Bernardin dan Russel (1993) menjelaskan ada 3 aktivitas dalam program pelatihan . yang kedua yaitu pengembangan program yang mana bertujuan untuk merancang lingkungan dan metode-metode yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan.

Pengembangan program adalah kegiatan untuk membangun dan meningkatkan kinerja KUD yang di berdayakan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan melalui pembinaan dan pelatihan agar dapat mendorong KUD bekerja secara efektif dan efisien. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan pengembangan.

Kemudian lebih di jelaskan lagi menurut Sukiman, (dalam Pengembangan Media Pembelajaran, 2012; 53) bahwa, pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (fikiran, pengetahuan dan sebagainya). Dari uraian tersebut dapat di artikan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, baik itu produk yang berupa barang atau kemampuan, berupa proses maupun rancangan.

Sedangkan pengertian untuk program itu sendiri yaitu secara umum himpunan atau kumpulan instruksi tertulis. Menurut Sukrisno, program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan di rangkai menjadi suatu ke satuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang di implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat di eksekusi oleh computer.

Oleh karena itu, bisa di artikan pengembangan program itu cukup penting guna untuk dapat merupah wawasan pengurus-pengurus KUD melalui kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang telah di buat oleh Dinas Koperasi dan UKM. Apabila pengurus sudah faham tentang beberapa ilmu Koperasi maka bisa menjadi dampak positif bagi KUD tersebut.

Indikator pemberdayaan yang menjadi penilaian dalam penelitian adalah kegiatan mengumpulkan pengembangan program. Maksudnya adalah usaha mengembangkan informasi yang dilakukan oleh Dinas setelah melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk pemberdayaan pengurus KUD di kecamatan Sengingi. Untuk itu ditampilkan hasil penelitian berkaitan dengan indikator diatas sebagaimana Tabel V.5 berikut ini.

Tabel V.5 : Pengembangan Program

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tentang keberhasilan pelatihan	3 (13,04%)	14 (60,87%)	6 (26,09%)	23 (100%)
2	Dalam menjalankan DIKLAT	6 (26,09%)	13 (56,52%)	4 (17,39%)	23 (100%)
3	Metode-metode dan materi-materi pelatihan	4 (17,39%)	13 (56,52%)	6 (26,09%)	23 (100%)
4	Bagaimana dengan metode dan materi apa bisa di terapkan	3 (13,04%)	12 (52,17%)	8 (34,79%)	23 (100%)
5	Bagaimana dalam DIKLAT apa bisa di fahami pengurus KUD	- (0)	15 (65,21%)	8 (34,79%)	23 (100%)
Jumlah		16	67	32	115
Rata-Rata		3,2	13,4	6,4	23
Persentase		13,91%	58,27%	27,82%	100%

Sumber : Data Penelitian

Dari tabel V.5 diatas mengenai indikator pengembangan program untuk program pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap

beberapa pengurus KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dapat di ketahui bahwa dari 23 orang yang peneliti lakukan sebagai responden untuk item Pertama yang di nilai tentang “ Keberhasilan Pelatihan”, dalam kategori penilaian kategori baik dengan jumlah 3 orang dengan persentase sebesar 13,04%. Untuk kategori penilaian cukup baik berjumlah 14 orang responden dengan persentase 60,87%, untuk jawaban ini responden sangat banyak menjawab sehingga cukup mendominasi jawaban-jawaban yang lain. Untuk jawaban kategori kurang baik berjumlah 6 orang responden dengan persentase 26,09%. Di pertanyaan ini sangat di dominasi oleh jawaban Cukup Baik, ada beberapa alasan responden yang mengatakan bahwa mereka tidak tau dan tidak bisa menilai bagaimana tingkat keberhasilan yang di maksudkan, sehingga dia menganggap jika KUD mereka sudah berjalan dengan baik sehingga mereka menjawab cukup baik.

Untuk item pertanyaan yang Ke Dua yang dinilai tentang “Menjalankan DIKLAT ”, dalam kategori penilain Baik berjumlah 6 orang dengan persentase 26,09%. Untuk kategori penilain cukup baik di sini berjumlah 13 orang responden jika di persentase kan sekitar 56,52%. Kemudian untuk kategori kurang baik se,ua berjumlah 4 orang responden atau sama dengan 17,39%. Untuk pertanyaan kedua ini di dominasi dengan jawaban cukup baik, dimana dengan berbagai macam alasan, bahwa dalam pelatihan mereka menganggap bagus tapi di sayangkan tidak terlalu rutin dan tidak merata.

Untuk pertanyaan ke Tiga tentang “Metode-metode dan Materi-materi Pelatihan”, untuk penilaian kategori baik responden hanya berjumlah 4

orangresponden atau sama dengan 17,39% saja. Kemudian untuk kategori cukup baik responden berjumlah 13 orang responden jika di persentasekan sama dengan 56,52%, sedangkan untuk kategori kurang baik itu sekitar 6 orang responden jika di persentase kan sama dengan 26,09%. Dengan demikian dalam pertanyaa ketiga ini di dominasi oleh kategori”Cukup Baik”, dengan alasan para responden tidak terlalu memerhatikan materi-materi dan metode nya saat sedang pelatihan, mereka hanya menyaring inti-intinya saja, contoh tentang pealtihan bagaimana menyusun pembukuan Koperasi.

Untuk pertanyaan ke Empat yaitu tentang “bagaimana dengan penerapan materi-materi dan metode pelatihan”. Dalam kategori baik para responden menjawab sekitar 3 orang responden dengan persentase sebesar 13,04%, kemudian untuk kategori cukup baik dengan jumlah responden 12 orang responden atau sama dengan 52,17%. Untuk kategori kurang baik ada 8 responden dengan persentase 34,79%. Jadi untuk pertanyaan ke empat ini mayoritas responden menjawab “cukup baik”, dengan alasan mereka tidak semua menerapkan materi dan metode yang di berikan saat pelatihan Karena apa yang di bahas belum tentu sama dengan kejadian di lapangan.

Pertanyaan ke Lima, dengan pertanyaan “bagaiaman dalam DIKLAT apa bisa di fahami pengurus”, disini para responden yang berjumlah 23 orang responden telah menjawab yang mana dari 23 responden tersebut 0 di antaranya telah menjawab dengan kategori baik dengan persentase 0%, kemudian di kategori cukup baik berjumlah 15 orang rsponden dengan persentase 65,2% dan yang terkahir di kategori kurang baik berjumlah 8 orang responden atau sama dengan

34,79%. Berbagai macam alasan mereka menganggap bahwa tidak semua pengurus berpendidikan tinggi, sehingga ada beberapa pengurus hanya mendengarkan tapi dalam penerapannya, akan tetapi cukup banyak juga pengurus yang merasa faham dengan apa yang di jelaskan oleh pemateri.

Berikut adalah penjelasan tentang tabel V.4 tentang “pengembangan program”, berdasarkan hasil dari tabel rekapitulasi tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban yang paling mendominasi dari indikator pertama yaitu berada pada kategori Baik dengan jumlah responden menjawab sebanyak 16 orang responden dengan rata-rata 3,2 atau dengan persentase mencapai 13,91%. Kemudian di posisi selanjutnya responden menjawab dengan kategori cukup baik dengan jumlah responden 67 orang responden dengan rata-rata 13,4 dengan pencapaian persentase 58,27%. Selanjutnya untuk kategori kurang baik ada 32 orang responden dengan rata-rata 6,4 pencapaian persentase 27,82%.

Jawaban-jawaban yang telah peneliti dapatkan juga di lengkapi dengan hasil wawancara dengan pengurus Dinas Koperasi dan UKM, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Bapak Hendri Raham, SE yang menjabat sebagai Kasi Koperasi, mengatakan :

“Kami, sebagai Dinas yang memegang menaungi KUD-KUD yang ada di Kabupaten ini sudah melakukan seoptimal mungkin untuk melakukan pengembangan dalam pelatihan, baik dalam materi maupun metode-metode pelatihannya. Karena tujuan semua dinas pada dasarnya memang ingin melihat organisasi yang ada di bawah naungannya itu berjalan maju bukan malah berjalan mundur, meskipun masih ada beberapa kendala di lapangan. Karena tidak semua kepala memiliki pemikiran yang sama, jadi mungkin bisa adek terjemahkan sendiri.”

Dengan demikian indikator pengembangan program dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang telah di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM

bisa di kategorikan cukup baik. Walaupun demikian bukan berarti tidak memiliki kekurangan yang memang masih perlu ada perbaikan. Karena mau bagaimana pun Dinas Koperasi dan UKM memang harus bisa berperan penuh untuk dapat memberdayakan dan memberikan pelatihan, jika perlu 1 tahun 2 kali guna untuk meningkatkan mutu pengurus KUD, sehingga KUD tersebut lebih berkualitas dalam menjalankan sistem di dalamnya.

C. Evaluasi

Menurut Bernardin dan Russel (1993) menjelaskan ada 3 aktivitas dalam program pelatihan, berikut penjelasan ke tiga dari poin-poin sebelumnya yaitu Evaluasi Program Pelatihan, yang mana secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah di laksanakan.

Evaluasi (penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai (dalam Siagian. 2011;117).

Menurut Lester dan Stewart evaluasi kebijakan ditunjukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan public yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (dalam Winarto 2012;229).

Menurut secara umum Evaluasi bisa di artikan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektifitas dan produktifitas, maupun

lingkungan kerja. Karena dari Evaluasi ini nanti bisa menimbulkan beberapa tujuan, yaitu :

- a) Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan
- b) Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching
- c) Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode
- d) Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada

Indikator pemberdayaan yang menjadi penilaian dalam penelitian adalah kegiatan Evaluasi. Maksudnya adalah yang dilakukan oleh Dinas setelah melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk pemberdayaan pengurus KUD di kecamatan Sengingi. Untuk itu ditampilkan hasil penelitian berkaitan dengan indikator di atas sebagaimana Tabel V.6 berikut ini.

Tabel V.6 : Evaluasi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tentang materi yang diberikan saat pelatihan, apakah sesuai	- (0)	17 (73,91%)	6 (26,09%)	23 (100%)
2	Kondisi KUD dengan adanya pelatihan	5 (21,73%)	12 (52,18%)	6 (26,09%)	23 (100%)
3	Sejauh mana materi pelatihan	7	10	6	23

	dalam membantu pengurus KUD	(30,43%)	(43,48%)	(26,09%)	(100%)
4	Apakah pemberi materi pelatihan berkomunikasi dengan efektif	2 (8,70%)	14 (60,87%)	7 (30,43%)	23 (100%)
5	Bagaimana tentang administrasi, manajemen, akutansi di KUD dengan adanya pelatihan	- (0)	15 (65,21%)	8 (34,79%)	23 (100%)
Jumlah		14	68	33	115
Rata-Rata		2,8	13,6	6,6	23
Persentase		12,17%	59,13%	28,70%	100%

Sumber : Data Penelitian

Dari tabel V.6 diatas mengenai indikator Evaluasi Program pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap beberapa pengurus KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dapat di ketahui bahwa dari 23 orang yang peneliti lakukan sebagai responden untuk item Pertama yang di nilai tentang “tentang materi yang diberikan saat pelatihan”, dalam kategori penilaian kategori baik dengan jumlah 0 orang dengan persentase sebesar 0%. Untuk kategori penilaian cukup baik berjumlah 17 orang responden dengan persentase 73,91%, untuk jawaban ini responden sangat banyak menjawab sehingga cukup mendominasi jawaban-jawaban yang lain. Untuk jawaban kategori kurang baik berjumlah 6 orang responden dengan persentase 26,09%. Di pertanyaan ini sangat di dominasi oleh jawaban Cukup Baik. Menurut beberapa alasan yang responden kemukakan, mereka menganggap memang sudah ada

kemajuan setelah adanya pelatihan yang telah di berikan oleh Dinas, tapi mereka berharap kalo bisa pelatihan nya itu di agendakan biar jelas, minimal 1 tahun 1 kali.

Untuk item pertanyaan yang Ke Dua yang dinilai tentang “Kondisi KUD dengan adanya pelatihan”, dalam kategori penilain Baik berjumlah 5 orang dengan persentase 21,73%. Untuk kategori penilain cukup baik di sini berjumlah 12 orang responden jika di persentase kan sekitar 52,18%. Kemudian untuk kategori kurang baik semua berjumlah 6 orang responden atau sama dengan 26,09%. Untuk pertanyaan kedua ini di dominasi dengan jawaban cukup baik, dimana dengan berbagai macam alasan, hampir sama alasan yang pertama, memang sudah ada kemajuan jika ada pelatihan, Karen pengurus KUD di berikan bekal materi-materi dan metode-metode perkoperasian.

Untuk pertanyaan ke Tiga tentang “sejauh mana materi pelatihan dalam membantu pengurus KUD”, untuk penilaian kategori baik responden hanya berjumlah 7 orang responden atau sama dengan 30,43%. Kemudian untuk kategori cukup baik responden berjumlah 10 orang responden jika di persentasekan sama dengan 43,48%, sedangkan untuk kategori kurang baik itu sekitar 6 orang responden jika di persentase kan sama dengan 26,09%. Dengan demikian dalam pertanyaa ketiga ini di dominasi oleh kategori”cukup baik”, dengan alasan para responden tidak terlalu memperhatikan materi-materi dan metode nya saat sedang pelatihan, mereka hanya menyaring inti-intinya saja, contoh tentang pealtihan bagaimana menyusun pembukuan Koperasi.

Untuk pertanyaan ke Empat yaitu tentang “Apakah pemberi materi pelatihan berkomunikasi dengan baik”. Dalam kategori baik para responden menjawab

sekitar 2 orang responden dengan persentase sebesar 8,70%, kemudian untuk kategori cukup baik dengan jumlah responden 14 orang responden atau sama dengan 60,87%. Untuk kategori kurang baik ada 7 responden dengan persentase 30,34%. Jadi untuk pertanyaan ke empat ini mayoritas responden menjawab “cukup baik”, dengan alasan mereka menganggap dalam komunikasi memang sudah cukup baik, tetapi kasihan jika orang yang kurang pendidikannya, sehingga masih ada yang kurang memahami.

Pertanyaan ke Lima, dengan pertanyaan “bagaimana administrasi, manajemen, dan akuntansi KUD dengan adanya pelatihan”, disini para responden yang berjumlah 23 orang responden telah menjawab yang mana dari 23 responden tersebut 0 di antaranya telah menjawab dengan kategori baik dengan persentase 0%, kemudian di kategori cukup baik berjumlah 15 orang responden dengan persentase 65,21 dan yang terakhir di kategori kurang baik berjumlah 8 orang responden atau sama dengan 34,79%. Berbagai macam alasan mereka menganggap keahlian para pengurus memang bukan semata-mata karna adanya pelatihan yang diberikan, tetapi memang ada beberapa pengurus yang memang sudah terbiasa karna mereka sudah cukup lama. Tapi ada juga yang merasa bersyukur juga mendapat ilmu dari adanya pelatihan yang diberikan Dinas.

Berikut adalah penjelasan tentang tabel V.5 tentang “Evaluasi Program Pelatihan Yang Telah Dilaksanakan Secara Efektif”, berdasarkan hasil dari tabel rekapitulasi tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban yang paling mendominasi dari indikator pertama yaitu berada pada kategori Baik dengan jumlah responden menjawab sebanyak 14 orang responden dengan rata-rata 2,8 atau dengan

persentase mencapai 12,17%. Kemudian di posisi selanjutnya responden menjawab dengan kategori cukup baik dengan jumlah responden 68 orang responden dengan rata-rata 13,6 dengan pencapaian persentase 59,13%. Selanjutnya untuk kategori kurang baik ada 33 orang responden dengan rata-rata 6,6 pencapaian persentase 28,70%.

Jawaban-jawaban yang telah peneliti dapatkan juga di lengkapi dengan hasil wawancara dengan pengurus Dinas Koperasi dan UKM, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Bapak Hendri Raham, SE yang menjabat sebagai Kasi Koperasi, mengatakan :

“Memang dalam mengevaluasi semua kegiatan yang telah di jalankan oleh Dinas ada sedikit kendala, yang paling jelas adalah jumlah personil Dinas yang mengurus Koperasi jumlahnya tidak banyak hanya ada 3 orang saja, dengan jumlah yang segitu otomatis kami tidak bisa memonitor semua, jadi kami hanya fokus pada KUD-KUD yang memang sudah kordinasi dengan Dinas untuk bisa memberikan penyuluhan. Jelasnya kami pun masih merasa ada kesulitan karena kurangnya jumlah pegawai Dinas yang mengurus bagian Koperasi”.

Dengan demikian indikator Evaluasi program pelatihan yang telah dilaksanakan secara efektif dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan yang telah di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM bisa di kategorikan cukup baik. Walaupun demikian bukan berarti tidak memiliki kekurangan yang memang masih perlu ada pebaikan. Khususnya di segi Evaluasi, Karen mau bagaimana pun mengevaluasi hasil kerja itu merupakan hal penting agar kita bisa menilai dan menjadikan nya tolak ukur untuk kemajuan kedepannya.

C. Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Melakukan Pemberdayaan Pengurus KUDdi Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan Nasional merupakan perwujudan dari tujuan suatu Bangsa Indonesia yang mana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur

dan bermartabat berdasarkan Ideologi Negara yaitu Pancasila dan Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional pada hakikatnya mencakup semua aspek kehidupan yang salah satunya yaitu pembangunan perekonomian kerakyatan.

Salah satu membangun perekonomian kerakyatan yaitu merupakan awal dari pembangunan Ekonomi Nasional, jika nanti masyarakatnya sudah sejahtera di aspek ekonomi maka bangsa Indonesia bisa menjadi salah satu bangsa yang Perekonomian Nasional maupun Internasional bisa di perhitungkan oleh Negara-Negara lain. Dengan adanya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dimana isi dari Undang-Undang tersebut sesuai dengan Bab II pasal 4 yaitu “Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan sekaligus sebagai tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.Sebelumnya pada pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Oleh karena itu, agar tercapainya program pembangunan di bidang perekonomian sesuai dengan skala nasional maupun internasional Negara harus bisa ikut berpartisipasi, karena instrument yang telah di bangun sudah mencukupi tinggal bagaimana menjalankan dan mengoprasikan sesuai dengan SOP yang berlaku. Baik dari pusat hingga ke pelosok Desa yang ada di setiap penjuru

Negeri, jika semua telah berjalan dengan baik maka tidak ada alasan untuk Negara yang kita cintai ini tidak maju di bidang ekonomi, baik mikro maupun makro.

Karena setiap Daerah sudah diberikan hak otonom, yang mana Daerah sudah bisa mengatur perekonomiannya sendiri yang mana dibantu oleh beberapa Dinas yang salah satunya Dinas Koperasi dan UKM. Untuk mengetahui rekapitulasi pelaksanaan tugas dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan yang telah penulis lakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian yaitu Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Karena dari hasil rekapitulasi ini lah kita bisa menilai dan menganalisa bagaimana kinerja Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan dalam menjalankan tugasnya. Apakah sudah cukup memuaskan atau masih perlu beberapa perbaikan buat kedepannya. Karena dengan melakukan penelitian ini lah penulis bisa menilai hasil kinerja Dinas terkait.

Berikut hasil rekapitulasi yang telah peneliti buat dalam tabel sesuai dengan penghitungan keseluruhan indikator :

Tabel V.7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Pengumpulan Informasi	8,2 (35,65%)	8 (34,79%)	6,8 (29,56%)	23 (100%)
2	Pengembangan Program	3,2 (13,91%)	13,4 (58,27%)	6,4 (27,82%)	23 (100%)
3	Evaluasi	2,8 (12,17%)	13,6 (59,13%)	6,6 (28,70%)	23 (100%)
Jumlah		14,2	35	19,8	69
Rata-Rata		4,73	11,67	6,6	23
Persentase		20,56%	50,74%	28,70%	100%

Sumber : Data Penelitian

Dari tabel V.7 diatas mengenai hasil rekapitulasi mengenai peranan Dinas Koperasi dan UKM terhadap beberapa pengurus KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, di jelaskan bahwa yang menyatakan kategori “Berperan” berjumlah 14,2 dan rata-rata responden 4,73 orang atau sama dengan 20,56%. Sedangkan yang menyatakan kedalam kategori “Cukup Berperan” berjumlah 35 dan rata-rata responden 11,67 orang atau sama dengan 50,74%. Untuk yang terakhir yaitu kategori “ Kurang Berperan” berjumlah 19,8 dan rata-rata responden 6,6 atau sama dengan 28,70%.

Jadi berdasarkan penjelasan tabel di atas sesuai data yang didapatkan, diketahui hasil dari penelitian tentang Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi berada di dalam kategori “CUKUP BERPERAN” dengan jumlah 35 orang dengan rata-rata 11,67 atau 50,74%. Berdasarkan pada rentang persentase 34-66% tergolong pada kategori “Cukup Berperan”.

Hasil yang penulis dapatkan di atas dilengkapi dengan hasil wawancara bersama pegawai Dinas Koperasi dan UKM yang bernama Bapak Hebdri Raham, SE tepatnya pada tanggal 19 Juni 2019 yang menjabat sebagai Kasi Koperasi, mengatakan :

“ Memang jika di nilai mungkin Dinas Koperasi dan UKM ini masih banyak kekurangannya. Tetapi meskipun begitu kami sudah bekerja sesuai dengan ketentuan dan SOP. Di segi pemberdayaan dan pelatihan yang kami lakukan pun kami anggap kami sudah melaksanakan semaksimal mungkin, memang benar tidak semua KUD-KUD yang ada di Kabupaten ini kami beri pelatihan dan pemberdayaan, Karena kami memberikan pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan kondisi KUD. Oleh karena itu, kami tidak bisa mengagendakan kapan dan di mana pelatihan itu bisa di laksanakan, kami juga tidak bisa mengintervensi kepada beberapa dinas lain jika memang ingin melakukan pelatihan dan pemberdayaan, karena ada beberapa Dinas lain juga yang bisa memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada KUD-KUD sesuai dengan kebutuhan yang sedang di hadapi oleh pengurus KUD. Seperti contoh bisa saja Dinas Perkebunan melakukan pelatihan dan pemberdayaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para petani dan pengurus KUD. kami juga minta maaf tidak bisa membuka mengenai masalah pembiayaan atau mengenai dengan masalah keuangan, banyak hal jika nanti kami membuka masalah Keuangan Kami. Intinya kami menganggap peranan yang Dinas ini terhadap tugas dan fungsinya sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa masalah internal yang mungkin tidak bisa kami bicarakan di forum diskusi ini”.

Demikian hasil yang di peroleh oleh peneliti mengenai Peranan Dinas Koperasi dan UKM terhadap pemberdayaan dan pelatihan yang telah di lakukan oleh dinas kepada Pengurus Koperasi Unit Desa yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan KUD Kecamatan Singingi berkaitan Tugas Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah Dinas yang menaungi beberapa Koperasi dan beberapa pelaku UKM tentu bukan merupakan sebuah pekerjaan dan tanggung jawab yang ringan bagi Dinas. Karena baik buruk nya Unit-unit yang ada di bawah itu menjadi tanggung jawab Dinas dan yang akan menjadi sorotan adalah Dinas nya yang mana Dinas merupakan Instansi yang ditetapkan Oleh Pemerintah untuk menaungi Unit-unit di bawahnya. Peneliti akan menuturkan beberapa hal yang menjadi penghambat Dinas Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas fungsinya yang mana fokus pada bidang Koperasi.

Berikut faktor penghambat yang telah penulis dapatkan sesuai dengan penuturan pegawai Dinas Koperasi dan UKM tepatnya bagian Koperasi :

1. Dinas merasakan masih kurangnya jumlah pegawai atau staf di bagian Koperasi, karena dengan jumlah staf yang hanya 3 orang, bidang Koperasi masih belum bisa bekerja secara merata dalam menangani KUD-KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Singingi. Sehingga dalam menjalankan kegiatan seperti pelatihan terkadang kurang maksimal, dan itu yang mengakibatkan KUD-KUD merasa kurang diperhatikan oleh Dinas.
2. Dalam melakukan pelatihan, Dinas merasa masih perlu bekerja keras untuk melatih beberapa pengurus yang tidak terlalu faham dengan ilmu Koperasi. Karena mau bagaimanapun Dinas tidak bisa menekan KUD untuk memilih pengurus yang berpendidikan tinggi dan yang berpengalaman.

Karena sistem perekrutan itu sudah menjadi urusan rumah tangga KUD tersebut dan atas persetujuan anggota atau petani.

3. Dalam kegiatan pelatihan, Dinas masih merasa kurang maksimal karena ada beberapa faktor yang tidak bisa di ungkapkan karena masuk dalam ranah internal Dinas, karena itu sudah menjadi kebijakan kepala Dinas. Sehingga Kabid Koperasi tidak bisa sembarangan mengagendakan kegiatan pelatihan tersebut. Karena masuk kedalam ranah internal maka kabid humas hanya memberi sedikit bocoran yang salah satunya yaitu mengenai anggaran.
4. Selain itu, menurut keterangan beberapa pengurus KUD juga ada beberapa faktor penghambat yang membuat KUD sulit untuk maju dan berkembang, di antaranya yaitu :
 - a. Kurangnya perhatian Dinas terhadap KUD-KUD yang ada, sehingga pegurus KUD merasa kurang di bina dan di latih untuk lebih ahli dalam menjalankan kegiatan Koperasi
 - b. Masih minimnya SDM yang mau ikut bergerak di kegiatan KUD
 - c. Kurangnya perhatian Kepala Desa, sehingga KUD merasa sulit untuk mencari mitra untuk bekerja sama.
 - d. Masih ada beberapa SDM yang mementingkan sendiri demi keuntungan pribadi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan di lapangan, peneliti telah melakukan analisis dan dilengkapi dengan pembahasan hasil penelitian.

Dari beberapa indikator hasil penelitian yang disajikan maka dapat disimpulkan bahwa “Peranan Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Dalam Melakukan Pemberdayaan Pengurus Koperasi Unit Desa Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi” di kategorikan “Cukup Berperan”. Berdasarkan pada rentang persentase 34-66% tergolong pada kategori “Cukup Berperan”.

Dalam kategori “Cukup Berperan” dari penelitian menjawab bahwa Peranan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan atau yang saat ini dalam melakukan pemberdayaan terhadap pengurus pengurus KUD yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ini masih masih belum maksimal dan kurang memuaskan belum menjawab persoalan persoalan real pengurus dan kinerja pemberdayaan belum didukung oleh fakta nyata di lapangan yang telah peneliti lihat dan analisa. Bahwa masih ada beberapa KUD yang kurang aktif dan sulit berkembang. Diantaranya mereka kurang mengerti tentang tujuan pokok koperasi itu sendiri, sehingga masih samar dalam menjalankan misi koperasi. Kemudian ketidak tranpransi pengurus menimbulkan mis persepsi diantara sesama pengurus dan masih cenderung

tidak menunjukkan sikap kejujuran, hanya mementingkan dirinya sendiri dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

B. Saran

1. Perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang perkoprasian baik kepada pengurus maupun anggota, agar pencapaian misi koperasi dapat diselenggarakan secara kooperatif. Dimana misi koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan sekaligus sebagai tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".Sebelumnya pada pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskankegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Dalam melakukan pemberdayaan kepada perlu dilakukan lebih intensif sembari memberi pembimbingan dan pendamping secara intensif dan berkelanjutan. Selalu membangun komunikasi secara intens dengan pengurus menanyakan permasalahan yang sedang mereka hadapi
3. Perlu diberikan pengetahuan berkaitan dengan ke organisasi, administrasi dan manajemen agar proses pengelolaan koperasi selain lancar, bisa meningkatkan produktivitas dan efektifitas keinginan dan harapan anggota.
4. Perlu mengagendakan pelatihan secara teratur dan tidak membuat program pemberdayaan yang terkesan mendadak serta tidak terencana dengan baik. Praktek pelatihan ini berguna selain bersifat continue meningkatkan

pengetahuan juga berguna untuk pengkaderan kepengurusan demi keberlanjutan pengembangan organisasi KUD.

5. Kemudian saran untuk anggota KUD yang mana yaitu petani, bahwa petani yang telah di naungi oleh KUD ini pun harus bisa bekerja sama guna untuk memajukan kegiatan KUD. Seperti contoh, dalam pembelian pupuk, alat-alat tani, WASERDA dan penjualan TBS itu semua melalui KUD bukan kepada pihak lain. Saya berharap Dinas bisa member arahan seperti ini kepada KUD supaya di sampaikan kepada petani/anggota.
6. Kemudian Hal ini menurut penulis yang sangat penting, dalam kegiatan pelatihan setiap pengurus harus di tekankan dalam hal pelatihan akhlaq dan moral. Karena dalam menjalankan Organisasi apalagi yang berhubungan dengan orang banyak seperti Koperasi Unit Desa ini sangat di butuhkan Molral yang baik. Dengan moral yang baik ini bisa meminimalisir tingkat kejahatan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri dan dan merugikan anggota di dalam Koperasi Unit Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal, Chaniago, 2005. *Perkoperasian Indonesia*. Angkasa Bandung
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Aditya. 2010. Definisi Pengukuran dan Penilaian Menurut Para Ahli. <http://www.academia.Teknik Pengukuran.com>. di akses pada tanggal 11 Desember 2018.
- AT. Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gajah Mada
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2001. *Manajemen (Dasar, Penegertian, dan Masalah)*. Bandung, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara (Revisi Kelima).
- Hariadi Sunarssu Samsi, dkk, 2016. *Prosiding Seminar Nasional Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Hans Mungker, 2011. *Membangun Undang-Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*. Reka Desa. Jakarta
- Hendrojogi, 2010. *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada
- Hegerwati Yuni, Dkk. 2017. *Gagasan Dan Solusi Bisnis Peluang*. Jakarta

- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Malang, Salemba Humanika
- Kartasasmita. G. 1996. *Power and Powerment; Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Marnis, 2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, PT. Panca Abdi Nugraha.
- Misbahul Ulum, dkk. 2007. *Model-Model Kesejahteraan Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*. Yogyakarta. PT LkiS Pelangi Aksara.
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Talizuduhu, 2003. *Kybernology. Ilmu pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta
- Oos M. Anwar, Haryono Suryono, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung, Alfabet.
- Pusat Bahasa, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetak kesembilan edisi IV)*. Jakarta. PT Gramedia Pusat Utama.
- Siagain, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Soetjipto, 2015. *Mengembangkan Koperasi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Siswanto, B, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.

- Solihin, Ismail, 2010. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Erlangga
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna, 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, PAPER PLANE
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Kencana
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga.
- Sedermayanti, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Tunggal, Amin Widjaja, 2002. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Voll, Willy D.S, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Waloejo. Ismojowati, 1993. *Koperasi Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka
- Widiayanti, Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2008. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Zulkifli, 201. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru, .UIR PRESS

Zubaidi . 2012. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta,

Dokumen:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, nomor 32 tahun 2004 tentang: *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Koperasi, Nomor 17 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015. Tentang Kelembagaan Koperasi.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010. Revisi Dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

Direktorat Jendral Bina Lembaga Koperasi Direktorat Bina Tatalaksana Koperasi. 1985